

**DAMPAK KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL TERHADAP KEKUASAAN  
STRUKTURAL INDONESIA (2020 - 2023)**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**LUTFI MAULANA TEDDY PUTRA**

20323053

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**DAMPAK KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL TERHADAP KEKUASAAN  
STRUKTURAL INDONESIA (2020 - 2023)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**LUTFI MAULANA TEDDY PUTRA**

20323053

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Dampak Kebijakan Hilirisasi Nikel Terhadap Kekuasaan Struktural**


**Indonesia (2020 - 2023)**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



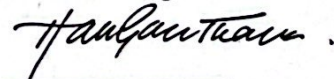
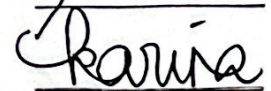
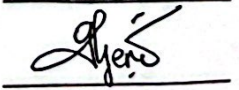
Ketua Program Studi

  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A.
- 2 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 3 Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 9 Juli 2024



---

LUTFI MAULANA TEDDY PUTRA

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Cakupan penelitian</b>	<b>6</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b>	<b>6</b>
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b>	<b>10</b>
<b>1.7 Argumen Sementara</b>	<b>12</b>
<b>1.8 Metode Penelitian</b>	<b>13</b>
1.8.1 Jenis Penelitian	13
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	13
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	14
1.8.4 Proses Penelitian	14
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b>	<b>14</b>
1.9.1 BAB I	14
1.9.2 BAB II	14
1.9.3 BAB III	15
1.9.4 BAB IV	15
<b>BAB 2</b>	
<b>KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL INDONESIA</b>	<b>16</b>
<b>2.1. Kebijakan Hilirisasi</b>	<b>16</b>
2.1.1 Alasan pemberlakuan kebijakan	17
2.1.1.1 Keterbatasan cadangan nikel yang tidak terbarukan	18
2.1.1.2 Kewajiban pembangunan smelter 2019	19
2.1.1.3 Peningkatan nilai valuasi dan ekonomi	20
<b>2.2. Dampak Kebijakan Dalam Domestik Indonesia</b>	<b>22</b>
2.2.1. Ketertarikan investor dalam pembangunan infrastruktur fasilitas pertambangan	22
2.2.2. Peningkatan nilai dan infrastruktur fasilitas pertambangan	24
<b>2.3. Dampak Kebijakan Terhadap Wilayah Eksternal</b>	<b>25</b>

2.3.1. Keterbatasan distribusi nikel pada pasar internasional	25
2.3.2. Intensitas gejolak harga nikel pada pasar internasional	26
2.3.3. Terganggunya aktivitas industri luar negeri	27
2.3.4. Perolehan kerja sama Indonesia China	28
2.3.5 Gugatan WTO terhadap kebijakan hilirisasi nikel atas pelanggaran GATT	28
<b>BAB 3</b>	
<b>KEKUASAAN STRUKTURAL INDONESIA</b>	<b>30</b>
<b>3.1. Structural Power Susan Strange</b>	<b>30</b>
3.1.1 <i>Security</i>	31
3.1.2 <i>Production</i>	36
3.1.3 <i>Finance</i>	42
3.1.4 <i>Knowledge</i>	48
<b>3.2 Hasil Analisis</b>	<b>53</b>
<b>BAB 4</b>	
<b>PENUTUP</b>	<b>57</b>
<b>4.1. Kesimpulan</b>	<b>57</b>
<b>4.2 Rekomendasi</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Pilar Kekuasaan Struktural</b>	31
<b>Tabel 2. 10 Perusahaan Tambang Nikel Terbesar di Indonesia</b>	38
<b>Tabel 3. Penggunaan Teknologi <i>Smelter</i> dan Asal Teknologi</b>	49
<b>Tabel 4. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Kebijakan</b>	54

## DAFTAR GRAFIK

**Grafik 1. Nilai Kurs Rupiah**

46

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1. Piramida Kekuasaan Struktural**

11

## ABSTRAK

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, nikel menjadi salah satu sumber daya alam tambang terbesar yang dimiliki Indonesia dan menjadi cadangan nikel terbesar di dunia. Dengan kekuatan sumber daya alam ini, Indonesia menggunakan upayanya dalam mempengaruhi pasar dunia. Dimana kebijakan yang dikeluarkan Indonesia berupaya untuk meningkatkan kekuatan negaranya dengan cara pemberhentian ekspor nikel mentah untuk peningkatan nilai hasil tambang. Disisi lain tentunya kebijakan ini memiliki dampak terhadap ranah global, terlebih ketika kebutuhan nikel dunia sedang tinggi harus terhambat distribusinya akibat terbatasnya pasokan nikel pada pasar. Indonesia mendapat gugatan dalam Organisasi Perdagangan Dunia atas pelanggaran pasal XI ayat 1 GATT 1994. Indonesia tentu telah mampu menjadi pengaruh dalam ranah internasional yang melibatkan sejumlah pihak mulai dari *governmental* juga *non-government* yang mana menjelaskan kekuatannya sebagai kekuasaan struktural dengan cadangan sumber daya alam terhadap perekonomian dunia salah satunya pada sektor tambang nikel.

**Kata-kata kunci:** Kekuasaan Struktural, Indonesia, Kebijakan Hilirisasi, Organisasi Perdagangan Dunia.

## ABSTRACT

*Indonesia has abundant natural resource wealth, nickel is one of the largest mining natural resources owned by Indonesia and is the largest nickel reserve in the world. With the power of these natural resources, Indonesia uses its efforts to influence the world market. Where the policy issued by Indonesia seeks to increase the country's strength by stopping exports of raw nickel to increase the value of mining products. On the other hand, of course, this policy has an impact on the global realm, especially when the world's demand for nickel is high, distribution is hampered due to limited nickel supply on the market. Indonesia received a lawsuit at the World Trade Organization for violating Article one of them in the world is the nickel mining sector.*

**Keywords:** *Structural Power, Indonesia, Downstream Policy, World Trade Organization.*

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam melimpah bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, bahkan bisa juga kekayaan alam Indonesia melebihi dari negara maju. Dimana banyak negara yang menginginkan kekayaan sumber daya alam seperti Indonesia. Dalam memenuhi kebutuhan antar negara, tentu tidak akan terlepas dengan adanya pertukaran kebutuhan dengan nilai tertentu yang disepakati dan menjadikannya sebagai jalur ekonomi baru sebagai pembuka pasar internasional. Perekonomian internasional yang terjalin sekarang sudah lebih masif akibat gejolak globalisasi yang telah mengembangkan berbagai sektor dalam jalinan kerja sama (Lutfi, 2023).

Terdapat berbagai kerja sama yang dijalin pada ranah global saat ini, seperti kebutuhan ekspor-impor, jalinan hubungan diplomasi, keanggotaan organisasi internasional, dan lain sebagainya. Tentu dalam jalinan kerja sama yang dibangun oleh antar negara memiliki ketergantungan atas kepentingannya. Hubungan yang saling ketergantungan ini kembali lagi tidak terlepas dengan ekonomi internasional yang saling mempengaruhi kompetisi dalam mencukupi persaingan kebutuhan tiap negara yang berbeda, terlebih dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki dan begitu pula kebutuhan sumber dayanya (Oatley, 2023).

Dalam hal ini Indonesia memiliki peran yang menjadi ketergantungan negara luar dengan sumber daya alam melimpah yang dimiliki. Terlebih ketika Indonesia sebagai negara yang memiliki cadangan nikel paling besar di dunia

seperti yang tercantum pada *booklet* “Peluang Investasi Nikel Indonesia” dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia bahwa Indonesia memiliki cadangan 72 juta ton nikel dari 139.419.000 ton nikel di dunia. Dengan begitu dapat mengindikasikan Indonesia memiliki 52% dari total cadangan dunia. Dengan besarnya cadangan nikel di Indonesia ini, didorong pula dengan kebutuhan nikel seperti untuk bahan campuran logam anti karat serta juga baterai listrik membuat potensi pengembangan di Indonesia hendak dimaksimalkan. Terlebih lagi ketika dunia mulai sadar pula dengan kebutuhan kendaraan listrik sebagai kendaraan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Pembuatan kendaraan listrik sendiri tentunya akan sangat bergantung pada nikel Indonesia dimana sangat dibutuhkan sebagai logam campuran dan juga baterai yang menjadi dasar utamanya (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2020).

Melihat potensi ini, pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk berupaya dalam memaksimalkannya agar dapat memajukan negara Indonesia dengan kekuatan ini. Namun, Indonesia juga mengalami beberapa pertimbangan yang menjadi hambatan karena kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang terbatas. Indonesia membutuhkan *smelter* sebagai fasilitas pemurnian dan pengolahan hasil tambang untuk mengolah bijih nikel secara maksimal dan dapat di ekspor dengan nilai produksi yang lebih tinggi. Bila tidak diupayakan seperti ini, maka akan menjadi bumerang yang akan menyulitkan Indonesia nantinya. Ketika nilai jual nikel yang di ekspor masih terbilang rendah dan cenderung masih mentah, nantinya harus dibeli kembali dari pihak asing yang mana merupakan sumber daya mereka sendiri. Maka dari itu, pada 1 Januari 2020, Indonesia

mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan ekspor nikel. Hal ini bertujuan untuk membentuk hilirisasi pertambangan mineral seperti nikel ke tahap yang lebih lanjut. Hilirisasi yang dilakukan Indonesia ini pun menarik perhatian para investor untuk menanamkan modal kepada Indonesia terkait nikel yang dibutuhkan mereka. Dana Investasi yang diterima Indonesia ini dapat membantu dalam kebutuhan smelter agar dapat mencukupi kebutuhannya terkait pengolahan bijih nikel. Sejak pemberlakuan kebijakan ini, investor asing langsung bergerak cepat untuk melobi Indonesia dalam kepentingannya sebagai pemasok kebutuhan cadangan nikel (Agung, 2022).

Indonesia berencana untuk memikat investor asing dengan upaya menarik perhatian para investor, *Tesla Chief Executive* Elon Musk mendapatkan tawaran secara langsung dari bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam pertemuannya, Indonesia berupaya merangkul sejumlah pihak yang berpotensi terlibat dalam kebutuhan nikel, dan juga memperlihatkan kepada dunia besarnya kekuatan Indonesia dengan cadangan nikelnya memerlukan investor dalam perkembangannya dan juga menawarkan diri pada dunia atas pasokan nikelnya yang melimpah. Dengan perhatian ini, perusahaan besar seperti LG, Hyundai, dan Foxconn telah menandatangani kesepakatan investasinya dengan Indonesia dan terus mendatangkan perhatian dari para investor bahkan sampai 2023. Ketertarikan pihak asing kepada Indonesia membuat Indonesia mendirikan perusahaan yang bekerja sama dengan investor asing dalam pengembangan pemasok bahan baterai kendaraan listrik yaitu *Indonesia Battery Corporation* (IBC) pada Maret 2021. IBC sendiri terlibat dalam segala pengembangan industri dari hulu hingga ke hilirnya (Anisatul, 2021).

Tentu dengan banyaknya investor yang memasuki industri nikel Indonesia memberikan sinyal tingginya kebutuhan nikel dan juga potensi dari kebijakan hilirisasi. Kebutuhan nikel yang beredar di dunia secara besar diambil dari Indonesia. Dalam hal ini, pasar dunia mengenai kebutuhan nikel menjadi melonjak setelah berkurangnya cadangan nikel yang beredar di pasarnya. Keterbatasan nikel yang tiba-tiba menjadi gejala bagi pasar, dengan permintaan kebutuhan yang melimpah dan keterbatasan jumlah nikel yang sedikit menjadikan permainan harga ikut melonjak. Terlebih jika pasokan pasar internasional tidak mengimbangi permintaan nikel yang diperlukan, maka tentunya harga nikel akan sangat bergantung pada Indonesia. Harga nikel juga telah melonjak jauh lebih tinggi dari Maret 2020 yang sempat terjun sebelumnya meski belum menjebol harga paling tingginya pada 2007 yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan ini sangat berpotensi dalam menaikkan kekuatan Indonesia pada dunia Internasional (Tirta, 2021).

Ketergantungan nikel dunia ini tentu sangat mempengaruhi kawasan industri nikel salah satunya kawasan Uni Eropa. Mayoritas negara industri pada Uni Eropa merupakan pabrik industri yang mengolah bahan mentah nikel dan masyarakatnya banyak bergantung pada lahan pekerjaan industri tersebut. Adanya kebijakan hilirisasi nikel tentunya merugikan Uni Eropa dan membuat mereka marah karena dengan tidak tersedianya bahan mentah nikel untuk diolah dan memicu banyak industri yang harus berhenti beroperasi (Wilda, 2021).

Berhentinya dari industri pengolahan nikel di kawasan Uni Eropa ini tentunya mengalami masa-masa sulitnya. Dimana pasokan bijih nikel kawasan Uni Eropa 55% dari bahan mentah yang akan mereka produksi berasal dari

Indonesia. Organisasi asosiasi produsen baja Uni Eropa “EUROFER” (The European Steel Producers Association) mendukung gugatan Uni Eropa terkait pada Kebijakan Hilirisasi yang dilakukan Indonesia. Kebijakan Indonesia yang membatasi produk ekspor mineral terutama nikel, bijih besi, dan kromium sebagai bahan baku produksi industri kawasan Uni Eropa telah melanggar ketentuan dalam The General Agreement on Tariffs and Trades (GATT) yang telah disepakati (Asiatoday, 2021).

Dengan pertimbangan dari berbagai kepentingan dari keadaan tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji dari kebijakan hilirisasi nikel yang telah melibatkan aktor internasional dari respon atas kebijakan Indonesia. Seperti halnya pemasukan dana investasi baru, terpengaruhnya wilayah industri asing, pasar nikel dunia, dan juga peningkatan nilai produksi nikel yang menjadi tujuan utama kebijakan ini. Dimana teori *Structures of Power* menjadi acuan pemahaman yang baik dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi aktor lain. Dengan teori ini, maka langkah-langkah yang sistematis saat mengidentifikasi dampak kebijakan hilirisasi nikel dapat dijelaskan melalui empat struktur yang jadi landasan analisa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana dampak kebijakan hilirisasi nikel terhadap kekuasaan struktural Indonesia ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana dampak kebijakan hilirisasi nikel terhadap kekuasaan struktural Indonesia.

#### **1.4 Cakupan penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian ini dilakukan penulis dengan fokus temanya terhadap Indonesia yang melakukan kebijakan hilirisasi nikel dan mempengaruhi politik ekonomi internasional. Maka, dimulainya kebijakan hilirisasi Indonesia pada tahun 2020 akan menjadi batasan penelitian dari ruang lingkup penulisan. Pada kebijakan hilirisasi nikel yang dilakukan memiliki berbagai pertimbangannya terkait dengan potensi peningkatan kekuatan ekonomi, kelingkungan, dan juga masyarakat sosial. Dengan aktifnya pengaruh kebijakan ini yang bergejolak hingga tahun 2023, maka penulis membatasi penelitian pada tahun 2023 setelah harus diperbarui kembali atas kekalahan dalam gugatan WTO. Akhir penelitian ini akan mencoba mengindikasikan dampak yang akan bersinggungan dalam ekonomi politik internasional antar negara melalui kekuasaan struktural Indonesia atas hilirisasi nikel. Penelitian juga dilakukan penulis secara terbatas dengan memanfaatkan berbagai sumber yang dapat ditemukan penulis secara resmi pada berbagai jaringan internet dalam keterbatasan penulis.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang dilakukan berdasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan terkait Kebijakan Hilirisasi Nikel 2020. Seperti pada jurnal yang ditemukan penulis berjudul “Analisis peluang, Tantangan, dan

Dampak Larangan Ekspor Nikel Terhadap Perdagangan Internasional Ditengah Gugatan Uni Eropa di WTO” dari Jurnal Ekonomi terbitan Januari 2023. Dimana artikel jurnal ini membawakan perjalanan kebijakan hilirisasi nikel mulai dari peluang, tantangan, hingga pada gugatan Uni Eropa kepada WTO. Ekspor Nikel yang dilakukan Indonesia memiliki pasarnya yang banyak, dimana Indonesia merupakan salah satu penghasil nikel terbesar di dunia berdasar pada data US Geological Survey pada Januari 2020 dengan cadangan 72 juta ton. Nilai produk ekspor bijih nikel meningkat sejak pemberlakuan larangan ekspor nikel pada kebijakan hilirisasi nikel, melansir pada data ekspor feronikel periode Januari - Agustus 2022 yang bernilai US\$8,76 miliar berbanding dengan nilai tahun 2021 yaitu US\$7,09 miliar dari data Kementerian ESDM 2021 (Syafira et al., 2023).

Peningkatan ini juga didukung dengan target transformasi program “*net zero emissions*” pada 2050 yang akan semakin mendorong permintaan pasar kepada nikel sebagai bahan pembuatan baterai listrik pada mobil listrik. Cadangan nikel juga diperkirakan akan habis jika dilakukan penambangan secara terus menerus. Maka dari itu, Indonesia melakukan pembatasan ekspor ini dalam upaya mengatasi terbatasnya cadangan nikel. Namun juga ketika Indonesia sebagai pemasok cadangan nikel terbesar, maka banyak negara pada Uni Eropa yang merasa dirugikan karena kegiatan produksi komoditas nikel mereka terhambat dengan ketergantungan pasokan nikel dari Indonesia. Dengan dampak ini, Uni Eropa mengajukan gugatannya atas kerugian yang dialami kepada WTO. Uni Eropa menyatakan bahwa Indonesia melakukan pelanggaran dalam melaksanakan perdagangan internasional yaitu pada The General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) 1994 yaitu pada pasal XI ayat 1. Gugatan ini pun membawa Indonesia

kepada persidangan yang meninjau kebijakan Indonesia, bila terbukti maka Indonesia harus melakukan revisi aturan kebijakannya, serta juga membayar sanksi ganti rugi (Syafira et al., 2023).

Jurnal lain dari Tsirwiyati and Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia 2023 menjelaskan tentang hambatan dan dampak dari kebijakan hilirisasi nikel dan juga arah kebijakannya. Larangan ekspor pada produk pertambangan sejatinya telah dirancang sejak 2009 yang lalu. Pada periode ini, investor diwajibkan untuk melakukan pengolahan tambang pada *smelter* di dalam negeri yang tercantum pada Undang-Undang No.4 tahun 2009. Kebijakan ini pun akan dilanjutkan pada larangan ekspor nikel yang dipersiapkan Indonesia untuk menjadi produsen nikel tingkat hulu, menengah, hingga hilir. Dengan melimpahnya cadangan nikel, Pemerintah mengupayakan penggolongan dana investasi pada perusahaan besar bidang baterai listrik dan kendaraan tenaga elektrik sebagai mitra bisnis maupun investor pembangunan. Sebagaimana yang tertera pada siaran pers BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Namun atas peninjauan lebih lanjutnya, terdapat dampak-dampak negatif terkait ancaman habisnya sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan, nilai permintaan yang tidak seimbang dengan ketersediaan, serta ketidakadilan distribusi sumber daya alam. Dengan dampak tersebut, gugatan Uni Eropa menyatakan bahwa kebijakan ini tidak berdasar pada perlindungan lingkungan hidup. Dengan rencana Indonesia yang ingin menjadi raja baterai elektrik kendaraan ini, dapat memicu kerusakan lingkungan. Dimana aturan Indonesia ini tidak bisa dicampuri masyarakat yang berada pada perlindungan lingkungan yang terjadi, dengan adanya industri yang banyak melakukan pelanggaran HAM seperti adanya penggundulan hutan dan

aturan penutupan lubang tambang yang tidak sesuai dengan kelestarian alam (Tsirwiyati and Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia 2023).

Pada jurnal yang dituliskan Marhaeni Ria Siombo membahas hilirisasi pertambangan minerba termasuk nikel. Dengan dinaikannya nilai tambah dan daya saing produk, akan membuat industri produksi semakin hilir yang diharap memberi kontribusi besar pada pendapatan domestik bruto negara. Pemerintah juga membuka kemudahan dalam perizinan investasi serta fasilitasnya baik investor asing maupun dalam negeri. Dalam mengatasi tuntutan pada WTO yang diajukan oleh Uni Eropa, Indonesia harus bisa menangani dengan kepentingan nasionalnya dengan dasar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan kepemilikan sumber daya alam yang dimiliki negara harus dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jurnal ini juga memberikan rekomendasi atas permasalahan pembangunan smelter, penghentian ekspor komoditas mineral logam Juni 2023, putusan sengketa DS 592 WTO terkait bukti pelanggaran Pasal XI.1 GATT 1994 yang tidak bisa dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) XX (d) 1994, dan juga masalah belum terbangunnya industri hilir Indonesia (Siombo, 2023).

Jurnal lain yang ditemukan penulis membahas dampaknya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Dimana kesadaran untuk menjaga lingkungan belum ada dan seimbang dari pihak terkait seperti industri perusahaan dan masyarakat yang terdampak. Kerusakan lingkungan disebutkan pada artikel ini dikarenakan kegiatan pertambangan pada area perhutanan, dan mempermasalahkan perizinan dari dinamika yang mementingkan keuntungan sepihak (Agussalim et al, 2023).

Artikel jurnal ke-lima memiliki peninjauan kebijakan hilirisasi nikel dengan mengeksplorasi pada perspektif neo-merkantilisme. Dari kebijakan pemberhentian ekspor bijih nikel ini telah meningkatkan Indonesia pada posisi titik perdagangan internasional. (Cahyani, 2023)

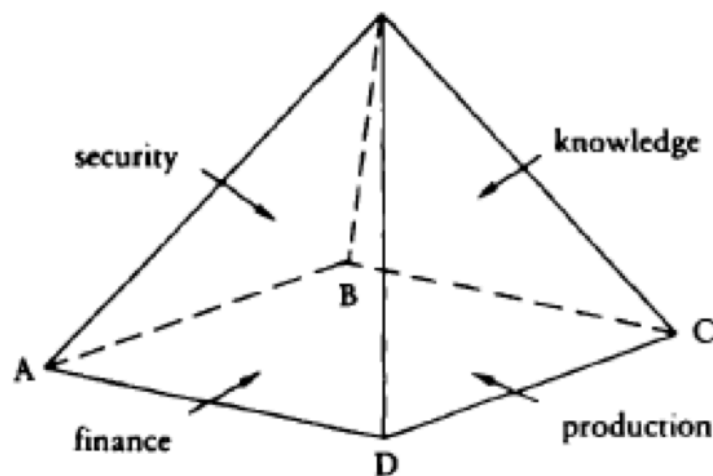
Dari penelitian-penelitian yang sebelumnya, memiliki pembahasan mulai dari potensi kebijakan hilirisasi, dampak negatif kebijakan terkait pula pada isu lingkungan, dan arah hukum kebijakan Indonesia telah sejauh mana. Sedangkan penulis dalam penelitian ini akan mencari bagaimana dari *Structural Power* yang dimiliki Indonesia sebagai negara yang mampu mempengaruhi dinamika ekonomi politik internasional. Dimana kecenderungan penelitian sebelumnya akan dijadikan beberapa acuan dalam melakukan penelitian menggunakan model *Structures of Power* dari Susan Strange yang menyorot kebijakan Indonesia sebagai pengaruh dinamika pasar nikel dan aktor negara maupun non-negara yang merespon dan berpartisipasi dalam perubahan struktur kekuasaan.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Penulis mengarahkan penelitian ini dengan relevansi yang ditemukan pada Teori dari Susan Strange yang mengembangkan struktur kekuasaan dalam ekonomi politik internasional. Susan membahas mengenai negara dan pasar saling berinteraksi dalam sistem internasional. Konsep ini pun mengacu pada munculnya pengaruh kekuatan yang tidak berasal dari militer maupun diplomasi saja, namun juga ada kontrol dari perekonomian dunia. Negara dengan akses kontrol yang besar dalam struktural sistem ekonomi dunia mampu untuk mempengaruhi kebijakan dan juga aktor yang terlibat. Peran dari lembaga internasional yang

menaungi dan terlibat pun dapat membentuk dinamika ekonomi global. Teori-teori tradisional yang memusatkan negara sebagai aktor utama pun juga dianggap sudah tidak relevan sebagai penggerak sistem internasional. Teori ini lebih mengedepankan pentingnya institusi juga aktor *non-governmental* dalam kontrol ekonomi politik. Dengan begitu Susan Strange menekankan bahwa dinamika pasar dan juga ekonomi mampu mempengaruhi hubungan internasional dalam antar negara, organisasi internasional, maupun tokoh atau aktor yang terlibat. Dalam pengembangan teori yang dituliskan oleh Strange, sub bab dalam “*Structures of Power*” terdapat pembahasan mengenai; kontrol atas sumber daya dan teknologi, kontrol atas keuangan dan aturan perdagangan, institusi internasional dan aturan perdagangan, dan kekuatan non-negara. Pandangan-pandangan dari Susan Strange inilah yang menjelaskan bagaimana struktur ekonomi internasional merupakan sumber kekuatan utama dalam jalinan hubungan internasional. Konsep ini menjadi peran penting dalam perubahan kekuatan dan kekuasaan ekonomi dari dunia global (Strange, 2015).

**Gambar 1. Piramida Kekuasaan Struktural**



Sumber : Susan Strange, 2015

“*Structural Power*” yang dibahas oleh Strange ini sendiri memiliki empat strukturnya; yaitu dari struktur keamanan, struktur produksi, struktur keuangan, struktur pengetahuan. Dari struktur keamanan sendiri membahas terkait kerangka kekuatan yang dibentuk dari fasilitas penyedia keamanan sebagai kebutuhan dasar dari manusia dalam kehidupannya. Struktur produksi juga masih satu benang merah sebagai struktur yang menyongsong kekayaan dalam politik ekonomi produksi sebagai dasar dari politik ekonomi. Struktur keuangan merupakan kekuatan dalam melatih daya beli konsumen yang juga mempengaruhi pasar dalam melakukan produksi. Dan keempat dan terakhir, struktur pengetahuan dimana kekuatan dari pengetahuan menjadi pengaruh paling besar dalam tiga kekuasaan struktur sebelumnya (Strange, 2015).

### **1.7 Argumen Sementara**

Dalam kebijakan hilirisasi nikel Indonesia, kontrol terhadap sumber daya alam sebagai sumber kekuatan yang akan digunakan Indonesia serta teknologi pengolahan akan berdampak pada kekuatan ekonomi Indonesia. Kekuatan Indonesia sebagai pemasok cadangan nikel dunia juga dapat menjadi kontrol penting dalam harga dan permintaan nikel dunia. Dengan kebutuhan nikel yang mana Indonesia sebagai sentral juga dapat mempengaruhi nilai mata uang Indonesia atas arus transaksi perdagangan maupun investasinya. Uni Eropa sendiri juga dalam merespon kebijakan Indonesia ini mengerahkan kekuatannya dalam dunia institusi internasional yang mana membawa Indonesia dalam sidang WTO atas gugatannya yang merugikan dan melanggar aturan. Indonesia telah mampu mempengaruhi negara lain bahkan sampai organisasi internasional dengan

kebijakannya yang menggunakan kekuatan dari sumber dayanya. Bahkan juga Indonesia menarik aktor *non-government* dalam investasi dan kerja sama atas pengaruh dari kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini mengindikasikan dengan kebijakan hilirisasi yang mampu mempengaruhi hubungan internasional, Indonesia memiliki kekuatan yang sedang ditingkatkan dalam kekuasaan strukturalnya.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan teknik analisis Kualitatif. Objek yang diteliti dianalisa berdasarkan fakta yang tersedia lalu digabungkan dengan fakta lainnya untuk ditarik garis kesimpulannya dalam penelitian. Penelitian model ini dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan motivasi secara holistik dalam bentuk deskripsi kata dan bahasa yang menekankan kualitas data yang diobservasi bukan berasal pada kuesioner.

Metode penelitian ini juga sering sekali disebut sebagai naturalistik karena dilakukan pada objek fakta yang berkembang dengan adanya fakta tanpa dimanipulasi oleh penulis yang kehadirannya tidak mempengaruhi dinamika objek penelitian.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek penelitian penulis adalah kebijakan hilirisasi Indonesia, dengan objek penelitiannya yaitu kekuasaan struktural Indonesia.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan data sekunder yang mana tidak dilakukan secara langsung melalui wawancara dan menjadi studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan literatur berdasarkan laporan dan sumber resmi yang memiliki legalitasnya dari jejaring internet.

### *1.8.4 Proses Penelitian*

Penelitian dilakukan dengan melakukan tahapan mulai dari pra-riset dengan meninjau apakah isu layak diteliti. Lalu memilah teori dan menentukan rumusan masalah yang akan diteliti. Setelah itu penulis memilah data faktual yang diambil secara sekunder berdasarkan kredibilitas dan relevansi dengan topik penelitian. Dengan data yang dikumpulkan penulis menganalisa dengan dasar teori dan berusaha menjawab rumusan masalah secara deskriptif.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

### *1.9.1 BAB I*

Bagian awal ini berisikan mengenai pembahasan latar belakang dari permasalahan yang akan diteliti, dengan tidak lupa mencantumkan rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, dan metode penelitian.

### *1.9.2 BAB II*

Pada bagian kedua ini akan meninjau lebih lanjut terkait kesimpulan sementara atas tinjauan pustaka dan merangkumnya untuk menjelaskan lebih lanjut terkait kebijakan hilirisasi nikel Indonesia beserta dampak dari pemberlakuan kebijakan itu sendiri hingga penyelesaian dari kebijakan itu sendiri.

Bab ini juga menjelaskan bagaimana kekuatan dari kebijakan yang dikeluarkan Indonesia mampu mempengaruhi perdagangan internasional pada konteks sektor industri tambang mineral.

### *1.9.3 BAB III*

Lanjutan dari penelitian yang menganalisis bagaimana kekuatan kebijakan hilirisasi nikel ini berdampak pada ranah internasional yang melibatkan berbagai kekuatan sebagai penggerak yang saling mempengaruhi. Analisis akan memuat empat *Structures of Power* yang dituliskan oleh Susan Strange dengan empat struktur yang memainkan peran dengan saling berhubungan.

### *1.9.4 BAB IV*

Peneliti akan merangkum dan menarik kesimpulan serta saran atas hasil penelitian yang dilakukan.

## BAB 2

### KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL INDONESIA

#### 2.1. Kebijakan Hilirisasi

Kebijakan Hilirisasi Nikel merupakan suatu upaya Indonesia dalam memaksimalkan segala potensi pertambangan mineral terkhususkan pada komoditas Nikel. Indonesia sebagai entitas negara memiliki hak terhadap penguasaan terhadap objek tambangnya. Dengan begitu pada tanggal 1 Januari 2020 Pemerintahan Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait dari pelarangan ekspor nikel. Larangan ini tentunya memiliki acuan dasar hukumnya dari kepentingan Indonesia itu sendiri, seperti halnya pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 mengenai bijih nikel yang memiliki kandungannya dibawah dari angka 1,7%. dan juga terkait pada kewajiban pembangunan *smelter* dalam rangka perlindungan pasokan cadangan bahan baku tambang mineral. Kebijakan ini tentunya mendapatkan tentangan dari Uni Eropa, ketika importir terbesarnya melakukan kebijakan yang menghambat cadangan pasokannya maka terjadilah gejolak baru pada ekonomi politik internasional. Adanya kebijakan ini Uni Eropa mengalami kesulitan pada industri pengolahan nikelnya dan menganggap adanya monopoli sumber daya Internasional. Pada Resolusi PBB 1803 telah disepakati dengan kedaulatan SDA harus dapat dikelola bersama dengan pihak asing, yang mana distribusinya harus dapat merata. Dengan segala keresahan itu, Uni Eropa pun melayangkan gugatannya kepada WTO terhadap apa yang dilakukan Indonesia (Dwi Najah Tsirwiyati, 2023).

Larangan produk tambang mentah ini sudah direncanakan secara berkala sejak 2009, dimana adanya kewajiban bagi para investor dalam melakukan pengolahan hasil tambang dengan *smelter* dalam domestik. Kebijakan ini pula terdapat pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 lalu dengan peruntukan pengolahan hasil tambang menjadi barang setengah jadi dalam meningkatkan nilainya. Indonesia juga tengah bersiap dalam berperan sebagai produsen nikel pada tingkat hulu - menengah - hilir dalam menjadi negara dengan cadangan pasokan nikel yang melimpah dan mengambil potensi untuk merajai pasar nikel. Indonesia juga memiliki program pada 2019 nya terkait kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *electric vehicle* yang mana berupaya mengubah nikel kadar rendah menjadi cobalt dan lithium sebagai bahan baterai kendaraan listrik. Dari pertimbangan ini, dapat diperkirakan harga nikel mentah dapat melonjak tinggi bila perubahan nikel menjadi bahan siap produksi.

### ***2.1.1 Alasan pemberlakuan kebijakan***

Indonesia sebagai salah satu negara dengan kepemilikan cadangan nikel terbesar di dunia menjadikannya sebagai negara eksportir dengan produksi nikel terbesar pertama di dunia. Bahkan dengan kualitasnya bisa dibilang lebih tinggi dengan negara tetangganya yaitu Filipina. Nikel sendiri menjadi bahan tambang minerba dengan konsumen terbesarnya yaitu dari wilayah China dan juga Eropa. Pada tahun 2015 saja 50% dari konsumsi nikel di dunia telah diraup oleh China dan Eropa memiliki konsumsinya pada angka 20% (Dwi Najah Tsirwiyati, 2023).

### ***2.1.1.1 Keterbatasan cadangan nikel yang tidak terbarukan***

Dalam peninjauannya, Kebijakan Hilirisasi Nikel tentu memiliki paradigma dalam eksistensinya. Dimana kebijakan ini diperuntukkan dalam menjaga ancaman habisnya sumber daya alam yang tidak terbarukan dari adanya nilai ekonomi dengan permintaan yang terlalu meningkat namun ketersediaannya terbatas untuk jangka panjang karena tidak terbarukan sama sekali. Nikel sebagai sumber daya alam tidak terbarukan kini semakin dibutuhkan, dan berusaha di regulasi terkait stok cadangan terbatasnya. Dimana perkiraan habis jika adanya eksploitasi berlebih pada bijih mentah nikel yang mudah didapatkan dan tidak dimurnikan atau melalui proses dan regulasi yang tepat (Dwi Najah Tsirwiyati, 2023).

Pada forum G20 Indonesia menyampaikan bahwa akan terus menjaga rantai pasokan *critical minerals* sebagai salah satu negara terdepan pada perdagangan dunia. *Critical minerals* ini menjadi salah satu kebutuhan utama dalam melakukan transisi kepada energi terbarukan (Limanseto, 2023).

Kebutuhan nikel yang terus meningkat sejak 2022 lalu memerlukan regulasi dalam menjaga cadangan pasokan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Pemerintah dengan kebijakan pelarangan ekspor nikel ini menjurus pada ekspor bijih nikel mentah dengan perizinan yang lebih diperketat, ekspor harus melalui tahap pengolahan lebih lanjut atau pemurniannya pada *smelter* yang ada di Indonesia untuk dapat dipasarkan

dan didistribusikan pada pasar internasional dalam menjaga pasokan cadangan nikel. Dengan begitu Indonesia juga berupaya menjaga kedaulatan kekayaan sumber daya alam nya atas penetrasi pasar internasional agar dapat dimanfaatkan untuk keamanan domestik sebagai legitimasi kedaulatannya (Santoso et al., 2023).

#### ***2.1.1.2 Kewajiban pembangunan smelter 2019***

Dalam aturan “Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 11 tahun 2019 dimana perusahaan diwajibkan untuk mendirikan *smelter* untuk pemurnian, dengan adanya aturan ini menjadikan pengolahan bijih nikel memiliki nilai yang lebih tinggi dan lebih baik. Dengan langkah awal ini, pembatasan ekspor pada perdagangan dunia yang dilakukan mendapat rintangan dari Uni Eropa yg menggugat dikarenakan merugikan sebagai salah satu wilayah kawasan konsumsi nikel terbesar dunia setelah China.

Target dalam pembangunan *smelter* ini sendiri telah didorong pemerintah Indonesia dengan penuh dukungan dengan memberikan kompensasi ataupun tunjangan seperti *tax holiday*, *tax allowance*, impor barang modal dan juga kemudahan pembangunan infrastruktur dan fasilitas kebutuhan lainnya (Limanseto, 2023).

Kebijakan hilirisasi juga memicu pembangunan fasilitas pengolahan nikel (*smelter*) atas produsen asing yang menginginkan dan membutuhkan bijih nikel Indonesia sebelum diekspor atas regulasi perizinan yang telah diatur. Pembangunan *smelter* menjadi suatu kunci

penting dalam penyediaan bahan baku industri hilir dalam melakukan perkembangan teknologi dan infrastruktur. Pemerintah Indonesia menimbang potensi pengolahan nikel pada kelas 1 dan 2 agar dapat dikembangkan terutama kelas 1 sebagai dorongan pasokan bahan baku baterai. Indonesia menargetkan hingga 30 *smelter* untuk tahun 2023 untuk mengimbangi kebutuhan nikel yang terus meningkat. *Smelter* sebagai pengolahan nikel ini tentunya menjadikan hasil produksi dengan kualitas dan nilai yang lebih menguntungkan untuk dapat dijual dan distribusikan pada pasar internasional. Dengan nilai tambah yang ditingkatkan oleh Indonesia pada produksi nikel, maka Indonesia dapat berperan lebih sebagai negara produsen bukan lagi semata-mata menjadi produsen bahan mentah. Dengan kata lain Indonesia dapat berperan pada industri hulu yang menyediakan bahan baku untuk industri hilir yang masih memerlukan teknologi dan infrastruktur seperti pada pemenuhan pertumbuhan mobil listrik yang dibutuhkan pasar dunia (Santoso et al., 2023).

#### ***2.1.1.3 Peningkatan nilai valuasi dan ekonomi***

Pemerintahan Indonesia berusaha dalam memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil berdasar pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3. Dimana pengolahan sumber daya alam berusaha pemerintah memaksimalkan pengolahan dalam pengembangan tambang minerba untuk membuka lapangan kerja dan juga dimaksimalkan keuntungannya untuk rakyat indonesia.

Dikarenakan pula ekspor bijih nikel/nikel mentah hanya akan diolah oleh industri luar namun sialnya harus dibeli lagi oleh Indonesia dengan harga yang lebih mahal, dengan begitu tidak ada kepemilikan SDA untuk memakmurkan rakyat. Dalam upaya pemurnian nikel juga tentu Indonesia berupaya dalam meningkatkan nilai tukar rupiah dalam menjaga devisa negara akibat pemurnian nikel dalam aliran pasar dunia serta penarikan dana investor.

Pembangunan industri sel baterai kendaraan listrik dapat diperkirakan memaksimalkan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah juga mempertimbangkan peningkatan ekonomi domestik dan pendapatan APBN terhadap adanya larangan ekspor nikel yang tercantum pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 terkait perubahan kedua atas peraturan menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2019 terkait Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) (Dwi Najah Tsirwiyati, 2023).

Industri bijih nikel sendiri telah mendorong peningkatan ekonomi yang signifikan berdasarkan Data Ditjen Minerba pada penerimaan pajak industri nikel tahun 2020 dengan Rp. 2,97 triliun. Belum lagi keuntungan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang turut meningkat pada tahun 2020 sebanyak 4 kali lipat dari pada tahun 2015 yang lalu, dari yang semulanya 531 miliar menjadi 2,92 triliun. Keuntungan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri telah menghasilkan Rp. 26,3 triliun dengan adanya tambahan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nilai Rp. 58 Miliar dan Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN) Rp. 28 Miliar sebagai kontribusi terbesar pada PDRB Sulawesi Tenggara (Santoso et al., 2023).

Cadangan devisa sebagai aset keuangan luar negeri, menjadikan Indonesia mendapat penambahan keuntungan dari aktivitas perdagangan internasional melalui naiknya keuntungan penjualan ekspor nikel. Indonesia yang mulai menjadi negara produsen nikel akan melalui transaksi ekonomi internasional dengan pertukaran mata uang dan menaikkan nilai mata uang Indonesia. Peningkatan ini dapat memperkuat struktur industri dan juga berpeluang menambah terbukanya lapangan pekerjaan seiringan dengan perkembangan bisnis ekonominya. Tentu setiap keuntungan dan peningkatan yang dilakukan Indonesia ini menjadi upaya realisasi atas UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan rakyatnya (Deddy, Adriyanto, and Andreas N, 2023). Meski realitanya penguasaan sumber daya alam Indonesia sendiri telah banyak dikuasai pihak asing, seperti contoh sektor lain pada minyak bumi yang 90% hampir diperuntungkan bagi pihak asing (Basyirasyad, 2022).

## **2.2. Dampak Kebijakan Dalam Domestik Indonesia**

### ***2.2.1. Ketertarikan investor dalam pembangunan infrastruktur fasilitas pertambangan***

Dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan perkembangan hasil tambang, tentu membutuhkan modal yang besar dari para investor. Dimana dari hal ini Indonesia harus mampu merangkul para investor

yang berkepentingan dan memandang kebijakan ini sebagai prospek besar dalam pembangunan dan perkembangannya.

Indonesia atas upaya dari para *stakeholder* seperti Presiden bersamaan dengan BUMN serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tengah melakukan persiapan dana investasi dan kemitraan dalam pembangunan industri baterai listrik. Pada siaran pers BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) BUMN dan LG menjalin kerja sama dalam membangun produksi sel baterai kendaraan listrik dengan dana investasi mencapai USD 9.8 miliar. Investor lain yang juga akan berinvestasi dalam pembangunan *smelter* pengolahan nikel ialah PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Sumitomo Metal Mining Co Ltd Ningbo Lygend dan Tsingshan Group. Indonesia juga memulai kerja sama dengan perusahaan kendaraan listrik seperti Tesla, Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), Samsung, Build Your Dream (BYD), Farasis Energy, dan Panasonic dalam rencana pembangunan industri sel baterai kendaraan listrik (Dwi Najah Tsirwiyati, 2023).

GEM Co, perusahaan yang bersedia dalam keterlibatan sebagai mitra proyek juga menaruh komitmennya pada Indonesia dengan investasi \$30 miliar untuk pemurnian dan pengolahan produksi nikel Indonesia (Winona, 2022). Tertariknya investor untuk dalam penanaman modal ini juga didukung oleh pemerintah yang memberi proteksi dan juga lisensi pada para pemilik modal kelas atas yang menguasai industri dari hulu hingga hilir. Sementara perhatian ini sering terabaikan untuk usaha ekonomi menengah kebawah yang tidak terbantu dengan serius oleh pemerintah (Basyirrasjad, 2022).

### ***2.2.2. Peningkatan nilai dan infrastruktur fasilitas pertambangan***

Adanya kebijakan ini juga ditujukan dalam upaya meningkatkan nilai produk nikel agar lebih tinggi, dimana juga membutuhkan infrastruktur yang lebih untuk pengolahan dan pemurnian seperti smelter sebagai infrastruktur. Kebijakan ini dinilai mampu menumbuhkan ekosistem industri *stainless steel* dengan adanya penambahan nilai nikel sembilan belas kali lebih tinggi (Limanseto, 2023).

Kebijakan terkait larangan produk tambang mentah telah dirancang sedemikian rupa sejak 2009 pada Undang-Undang No. 4 tahun 2009 terkait minerba yang beresonansi dengan UU Minerba pengolahan barang tambang setengah jadi dalam rangka menaikkan nilainya. Nikel sebagai hasil tambang merupakan salah satu bahan penting dalam proses pembuatan mobil listrik. Hal ini sangat menguntungkan dimana pasar internasional sedang gencar dalam pengembangan kendaraan listrik. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 mendukung Indonesia dalam pengubahan nikel kadar rendah menjadi cobalt dan lithium sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Dalam perpres ini juga, memusatkan dalam Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai *electric vehicle* (EV) untuk jalan (Dwi Najah Tsirwiyati, 2023).

Indonesia telah memiliki 37 unit *smelter* pada 2023 berdasarkan data Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan tahap konstruksinya pada 39 *smelter* serta tahap rencana 35 unit atas data yang diberikan Rizal Kasli. Sementara pada Grand Strategi Minerba 2022 terdapat 102 unit *smelter* dengan Izin Usaha Industri (IUI) serta 9 unit dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). *Smelter* yang aktivitas industrinya berjalan menggunakan teknologi *Rotary Kiln Electric Furnace*

(RKEF) memiliki kapasitas 91 juta ton nikel belum ditambah *smelter* yang masih tahap konstruksi dan perencanaan memiliki kapasitas sekitar 128,5 juta ton yang mana total kapasitas bijih nikel mencapai 219, juta ton. Dengan estimasi Badan Geologi dan kebutuhan feeding cadangan bijih nikel dapat habis hanya dalam 11 tahun tanpa adanya eksplorasi penambangan dan pengolahan lebih lanjut (Shiddiq, 2023).

Banyaknya jumlah *smelter* tersebut sebagian besar dimiliki oleh petinggi-petinggi asing, perusahaan nikel yang besar beroperasi di Indonesia sendiri merupakan kepemilikan dari pihak asing. Perusahaan tersebut dikuasai oleh pihak pengelola yang meraup keuntungan ekstra. Pembangunan industri nikel memang memberikan dukungan bagi Indonesia, namun para pemilik dari perusahaan besar itu lah yang paling diuntungkan. Perusahaan mereka yang mampu memproduksi nikel dengan ekstra dan terbilang eksklusif di Indonesia, terlebih peningkatan nilai produksi perusahaan mereka lebih efisien dengan pengolahan langsung secara domestik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencantumkan lima perusahaan produksi nikel terbesar di Indonesia yang diuntungkan atas proyek hilirisasi ini. Kelimanya adalah : PT Vale Indonesia Tbk (INCO), PT Bintang Delapan Mineral, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Makmur Lestari Primatama, PT Citra Silika Mallawa (Umah 2021).

## **2.3. Dampak Kebijakan Terhadap Wilayah Eksternal**

### ***2.3.1. Keterbatasan distribusi nikel pada pasar internasional***

Adanya pemberlakuan kebijakan tentunya mempengaruhi pasar nikel dunia, dimana Indonesia sebagai pemasok cadangan nikel terbesar di dunia

menghentikan aktivitas perdagangan eksportnya dalam ranah pertambangan minerba. Tentu peredaran produk hasil tambang minerba yang ada pada pasar menjadi terbatas. Sementara pengembangan baterai listrik yang sedang gencar dicari pasar dunia dalam penggunaan kendaraan ramah lingkungan menjadi peningkatan permintaan pasar yang tidak seimbang dengan peredaran nikel di pasar internasional. Penjualan mobil berbasis baterai listrik baru mencapai 2% pada saat ini, namun perkiraan target peredaran kendaraan listrik akan mencapai 58% pada tahun 2040 (Fitriyani, 2022).

### ***2.3.2. Intensitas gejolak harga nikel pada pasar internasional***

Dengan terhambatnya cadangan minerba yang ada pada pasar, tentu *supply and demand* akan berpengaruh pada harga. Harga akan cenderung melonjak dikarenakan sedikitnya stok namun permintaan akan pasar semakin naik. Terlebih pada nikel dikala dunia gencar dalam inovasi kendaraan listrik yang membutuhkan nikel sebagai bahan dasar baterai dan juga campuran logam *stainless steel*.

Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai EV meningkatkan harga nikel mentah disaat nikel ditingkatkan nilainya menjadi bahan siap produksi. Harga nikel yang awal mulanya US\$ 40 untuk tiap ton menjadi US\$17.000 seiring dengan pasar dunia yang penuh minat atas kendaraan bertenaga listrik akan menguntungkan Indonesia secara maksimal (Dwi Najah Tsirwiyati, 2023).

Peningkatan harga nikel yang melonjak pada tahun 2022 yang rata-ratanya menyentuh US\$ 25.834 - US\$ 21.521 per ton sebelumnya ternyata tidak

membuahkan hasil yang konstan, harga nikel pada 2023 sendiri cenderung menurun setiap bulannya. Berdasarkan data Bank Dunia terpantau 40% harga turun pada akhir tahun 2023. Awal tahun yang masih menyentuh harga US\$ 28.00,61 per metrik ton menjadi US\$ 16.460,84 per metrik ton pada Desember 2023. Turun nya harga pada 2023 ini juga mengindikasikan bahwa stok yang awalnya terbatas sudah kembali dapat terpenuhi, terlebih dengan adanya perkembangan teknologi baterai *lithium ferro phosphate* (LFP) dari pada baterai *nickel, manganese, cobalt* (NMC). LFP sendiri memiliki harga yang lebih murah daripada nikel yang sedang naik dikarenakan jenis baterai yang sudah tidak lagi menggunakan nikel dan juga kobalt (Florentin, 2024).

### ***2.3.3. Terganggunya aktivitas industri luar negeri***

Industri pada kawasan uni eropa kebanyakan adalah industri yang mengolah bahan tambang seperti nikel, mulai dari otomotif dan lain-lainnya. Dengan terbatasnya stok yg diolah, tentu aktivitas pengolahan juga menjadi terhambat. Terhambatnya aktivitas ini pun menjadikan sejumlah industri mengalami kerugian dan harus memberhentikan aktivitas produksi pengolahan.

Andrew Forrest selaku pemilik perusahaan Wyloo Metals menutup tambangnya yang berada di Australia Barat diakibatkan gejolak harga nikel yang merosot pada tahun 2023. Dengan berhentinya Wylo Metals tentu 1000 pekerja yang menyambung hidup pada perusahaan tersebut terpaksa harus diberhentikan. Hal serupa juga terjadi pada industri nikel lainnya seperti Panoramic Resources yang menghentikan proyek nikelnya di Savannah, Australia Barat dikarenakan tidak mendapat bantuan dana dalam aktivitas industrinya. Tidak hanya Australia,

Kanada dengan perusahaan First Quantum Ltd juga memotong hasil produksi serta tenaga kerja pada aktivitas industrinya akibat harga nikel yang merosot. Dampak merosotnya harga nikel pada 2023 juga mengganggu BHP Groups Limited sebagai industri tambang yang besar (Florentin, 2024).

#### ***2.3.4. Perolehan kerja sama Indonesia China***

China sebagai negara konsumen nikel terbesar dari Indonesia berupaya dirangkul dalam pembangunan *smelter* di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku nikel di negaranya. China telah menjalin kerja sama dengan Indonesia sejak 1950 hingga saat ini meski sempat dibekukan pada era Soeharto. Jalinan kerja sama ini membuat China memenuhi diversifikasi rantai pasokan nikel dari Indonesia. China juga memiliki akses pertambangan mineral pada hasil produksi yang lebih terolah dan mengurangi pasokan bahan mentah dalam fleksibilitas produksinya. Investasi yang banyak dilakukan China di Indonesia sangat menguntungkan dimana harga hasil produksi domestik lebih rendah dengan nilai hasil produk yang lebih tinggi. Dengan begitu China dapat memperoleh harga dengan lebih murah dari dalam domestik Indonesia (Fauziyyah and Paksi, 2023).

#### **2.3.5 Gugatan WTO terhadap kebijakan hilirisasi nikel atas pelanggaran GATT**

Dalam gugatan Uni Eropa pada WTO tentu menganalisis tindakan kebijakan Indonesia yang terbukti melakukan pelanggaran pada aturan perdagangan dunia yang tertulis dalam GATT pasal X/XI dimana pembatasan

distribusi tidak boleh dilakukan dan Indonesia harus menanggung sanksi denda serta penghapusan atau ralat dari kebijakannya. Dengan segala kerugian dan keresahannya, organisasi Uni Eropa pun melaporkan tindakan kebijakan Indonesia ini pada WTO dengan acuan;

*Article XI: 1 General Agreement on Tariffs and trades (GATT) 1994, which reads:*

*“No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licenses or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting party.” (Adisuryo 2023)*

## **BAB 3**

### **KEKUASAAN STRUKTURAL INDONESIA**

#### **3.1. Structural Power Susan Strange**

Susan Strange menjelaskan “kekuasaan menjadi penentu hubungan antara otoritas dan pasar” dimana pasar tidak memainkan dominansi dalam ekonomi politik kecuali diizinkan oleh pemegang kekuasaan dan otoritas yang dalam penelitian ini adalah Indonesia. Pembahasan Susan menimbulkan pertanyaan dimana otoritas pemilik kekuasaan, namun juga mengapa mereka memilikinya dan apa sumber kekuatan tersebut. Dalam dunia internasional, tiap-tiap negara akan memiliki kekuatan yang berbeda-beda berdasarkan dari sumber yang berbeda seperti halnya Indonesia dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam nikel sebagai cadangan dunia terbesar (Strange, 2015).

Kekuasaan Struktural merupakan kekuatan dalam membentuk dan menentukan struktur ekonomi politik internasional (EPI), institusi politik, perusahaan, dan juga para aktor akademik atau profesional yang harus beroperasi. Kekuasaan struktural memberikan kekuasaan dalam memutuskan sesuatu dilakukan sebagaimana seharusnya dalam membangun kerangka kerja yang berhubungan antar negara, masyarakat, perusahaan. Indonesia menunjukkan kekuatannya dalam menentukan dan mempengaruhi ekonomi politik internasional bersama dengan negara, korporasi industri, juga para ahli yang terlibat dalam perannya. Susan juga menyebutkan bahwa kekuatan ekonomi akan semakin besar bila hanya satu pihak yang hanya mampu menjualnya, seperti dalam kebijakan Indonesia yang berupaya mendominasi pasar dan distribusi nikel dengan kepemilikan cadangan nikel terbesar di dunia (Strange, 2015).

**Tabel 1. Pilar Kekuasaan Struktural**

<b>No.</b>	<b>Structures</b>	<b>Description</b>
1.	<i>Security</i>	Entitas yang mampu memberikan perlindungan pada entitas lain terhadap suatu ancaman dapat menjalankan kekuatan dalam urusan non-keamanan lainnya.
2.	<i>Production</i>	Entitas yang menentukan apa yang harus diproduksi, siapa yang memproduksi, cara apa produksinya, dana, dan teknologi apa, serta bagaimana imbalannya dapat menguasai dan mempertahankan kekuatannya atau bahkan menyulitkan entitas lain.
3.	<i>Finance</i>	Entitas yang mampu menciptakan “kredit” ataupun memperoleh kepercayaan atas kemampuannya menciptakan “kredit” dapat mengendalikan perekonomian.
4.	<i>Knowledge</i>	Entitas yang mampu mengembangkan ataupun memperoleh serta menolak akses pada pengetahuan dan mengontrol saluran komunikasi pada penerima akses dapat menjalankan kekuasaan struktural yang khusus.

Sumber: Strange 2015

### **3.1.1 Security**

Kekuatan militer atas peringkat *global fire power* melihat dari delapan unsur pembentukannya mulai dari sumber daya manusia, kekuatan udara, kekuatan darat, kekuatan laut, sumber daya alam, logistik, keuangan, dan geografi. Dari delapan unsur tersebut tentu alat utama sistem senjata (alutsista) menjadi salah satu pendukung kekuatan baik dari militer darat, udara, hingga laut. Tingkat kekuatan militer Indonesia pada 2020 berdasarkan *global fire power* menduduki posisi 16 dari 138 negara di dunia dengan indeks kekuatan 0,2544 yang mana peringkat pertama dari Amerika Serikat dengan kekuatan 0,0606 diikuti Rusia (0,0681), dan China (0,0691). Dengan tingkat kekuatan militer ini, Indonesia menjadi militer dengan kekuatan terbesar di wilayah kawasan Asia Tenggara dari pada negara tetangganya (Gitiyarko, 2021).

Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia menjadikan suatu kekuatan dalam memberikan keamanan bagi cadangan nikel dunia. Dimana

Indonesia berupaya menjaga cadangan nikel yang dimilikinya agar dapat bertahan dan dikendalikan pasokannya. Dalam hal ini Indonesia berupaya melindungi cadangan nikel dunia untuk dirinya sendiri dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa pengolahan lebih lanjut. Indonesia juga berupaya menjaga hak kekayaan sumber daya alamnya yang seharusnya dimanfaatkan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya seperti halnya UUD 1945 Pasal 33.

Dalam menjaga keamanan nasional, Indonesia dengan kekuatan militernya turut selalu berpatroli dalam pengamanan wilayah nasional. Tidak sebatas patroli dalam pengamanan ancaman fisik, namun juga dalam pengamanan militer dalam menjaga objek vital seperti aktivitas industri sumber daya alam Indonesia. 2022 lalu Pangkalan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (Lanal) Kendari mengamankan tiga kapal yang tidak memiliki kelengkapan dokumen yang sesuai peraturan regulasi Undang-Undang Pelayaran pada Kendari Makassar. Dimana tiga kapal yang diamankan memiliki muatan bijih nikel tanpa kelengkapan surat sah dan beberapanya kadaluarsa. Penangkapan kapal ini menindak laporan intelijen terkait kapal bermuatan bijih nikel dari perairan Marombo ke Morowali. Ketiga kapal itu ialah kapal TB Marina 14 / 14 TK Marina Power 3009, TB. Beupe 2 / TK Bian 2, TB. Berau 22 / TK. PSOM 22. Hal ini tentu menjadi acuan bahwa kekuatan militer dalam perannya menjaga keamanan negara tentu juga harus menjaga objek vital pertambangan agar tidak selalu tergerus oleh pihak yang berupaya mengambil sumber daya alam tanpa regulasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari penangkapan aktivitas ilegal ini dapat dianalisis Indonesia menegaskan otoritasnya atas kepemilikan sumber daya alamnya. Aktivitas industri yang sudah memiliki aturan dan perizinannya harus dipatuhi

oleh pihak terlibat, bila terdapat penambangan ilegal yang mengancam memungkinkan akan adanya juga konflik yang terjadi disaat otoritas ditentang dan menolak. Maka dari itu Indonesia harus mampu bersikap tegas atas pelanggaran sebagai kontrol dalam mempertahankan dan melindungi keamanan nasionalnya salah satunya pada objek vital pertambangan (Puspen TNI, 2017).

Keamanan negara selalu menjadi peranan penting dalam menjalankan kedaulatan negara. Sistem pertahanan Indonesia menerapkan tiga komponen utama seperti halnya TNI, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Pertahanan negara tentunya membutuhkan komponen pendukung sebagaimana pentingnya industri pertahanan dalam keterlibatan pertahanan keamanan negara. Kebijakan hilirisasi nikel mampu menjaga cadangan nikel bersamaan dengan pembangunan inovasi industri pertahanan militer negara terutama sebagai pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam). Keamanan nasional tidak terlepas dari adanya sabotase semacam pencurian sumber daya alam yang harus dijaga. Pencurian hasil sumber daya alam tak terlepas dari domestik maupun internasional dengan beragam upaya, pencurian yang sering terjadi pada ranah tambang minerba ini bisa kita lihat dari adanya penambangan ilegal. Pangdam Kodam XIV Hasanuddin menyorot aktivitas ilegal dari PT. Babarina Putra Sulung pada Muara Lapao, Wolo, Kolaka yang hanya memiliki izin penambangan batuan namun juga melakukan penambangan nikel. Pentingnya izin pertambangan ini merupakan salah satu strategi defensif dalam menjaga pasokan cadangan nikel sebagai objek vital kekuatan negara. Ditemukan pula ekspor ilegal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai 5,3 juta ton untuk China. Tindakan semacam ini merupakan ancaman secara tidak

langsung yang juga harus dapat dikawal oleh pihak keamanan nasional demi menjaga pemenuhan industri yang ada termasuk industri pertahanan (G et al., 2023).

Strategi lanjutan inovasi dengan kendaraan tempur yang berbasis baterai atau elektrik telah dikembangkan sejak 2022 dengan dipamerkannya prototipe Maung EV pada Indo Defence 2022. Inovasi ini menjadi strategi pengembangan industri pertahanan negara yang sekaligus menyongsong kebijakan percepatan kendaraan listrik dan juga menjaga cadangan nikel dalam hilirisasi nikel. Penggunaan Stainless Steel 416 dengan ketahanan yang baik berpotensi sebagai bahan mesin yang berkualitas juga persenjataan, dirgantaraan, medis, dan energi transportasi atas pemanfaatan cadangan nikel untuk kepentingan peningkatan keamanan domestik. Peningkatan ini tentunya harus mendapat kawalan dari keterlibatan pemerintah dalam menggerakkan TNI maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam perlindungan pertambangan mineral sebagai objek vital nasional. Pengamanan Objek Vital Nasional telah tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 yang melindungi suatu kawasan, bangunan dan usaha yang menyangkut hajat hidup hidup orang banyak, kepentingan negara dan sumber pendapatan strategis negara. Dalam melakukan perlindungan aktivitas tambang seperti ilegal mining sebagai perlindungan objek vital nasional merupakan suatu bentuk kebijakan pertahanan (G et al., 2023).

Pasal 7 Undang-Undang 34 Tahun 2004 terkait Tentara Nasional Indonesia menjelaskan bahwa TNI memiliki dua operasi militer perang dan operasi militer selain perang (OMSP) dengan salah satunya adalah pengamanan objek vital nasional yang bersifat strategis. Urgensi ini sesuai dengan kebijakan hilirisasi

nikel yang strategis dalam penguatan kekuasaan struktural Indonesia. Menjaga objek vital nasional dapat dilakukan dengan penguatan wilayah kodam kawasan aktivitas penambangan dalam pemantauan dan peninjauan termasuk menimbulkan ketidakberanian aktivitas pertambangan ilegal yang diamankan. Sebaran kawasan tambang nikel yang tersebar pada Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sebagai wilayah Maluku, dan Sulawesi Tengah dapat menjadi wilayah khusus dalam penguatan objek vital nasional. Komando Daerah Militer (Kodam) XVI Patimura (PTM) turut melakukan latihan dan patroli pada wilayah objek vital tanpa mengganggu aktivitas pertambangan. Keterlibatan Angkatan sebagai alat pertahanan harus dapat menjalankan fungsi sosial dalam pembangunan dengan kewaspadaan dan siaga sebagai Bhakti TNI Surat keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor SKEP/480/XII/2004. Pengamanan yang menjaga objek vital merupakan bentuk dalam menjaga ketertiban masyarakat dan aktivis penambang untuk patuh terhadap aturan dan regulasi penambangan serta mencegah adanya ancaman dari spionase maupun pencurian sumber daya alam yang merugikan negara (G et al., 2023).

Industri pertahanan negara seperti PT Pindad (Persero) sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berinovasi secara aktif dalam produksi alutsista kebutuhan TNI, Polri dan telah memasuki pasar global pada ekspor produk unggulan seperti amunisi, senjata, dan kendaraan tempur. Pindad juga memiliki produksi alat berat seperti *tractor*, *excavator*, *crane*, kapal laut, pengait rel kereta api, motor traksi, dan generator pembangkit energi (PT PINDAD 2021). Perusahaan pelat merah khusus persenjataan ini telah mendapat pesanan 5000 unit Maung dari Kementerian Pertahanan (NurW, 2023). Dengan peningkatan alutsista

dan aktivitas perlindungan objek vital ini menjadi dorongan dalam memperkuat keamanan dan kekuatan Indonesia sehingga dapat memberikan perlindungan dalam domestik. Ini merupakan salah satu faktor penting dalam keamanan yang dipengaruhi oleh perubahan teknologi dalam persenjataan. Indonesia memaksimalkan cara dalam penguatan militer dari kendali atas teknologi dan materialnya seperti inovasi pada kendaraan tempurnya dan penjagaan industri tambang. Ancaman penambangan ilegal dan pelanggaran harus ditindak tegas oleh negara bersama dengan keamanannya sebagai bentuk dari perlindungan Indonesia terhadap kekayaan sumber daya alamnya serta ancaman pencurian maupun spionase dan aktivitas ilegal lainnya. Ancaman dari keamanan tidak hanya dari penolakan.

### ***3.1.2 Production***

Dengan kebijakan hilirisasi nikel yang membatasi jumlah ekspor nikel, Indonesia berupaya membatasi ekspor nikel mentah yang mana harus melalui regulasi dan perizinan atas produksi nikel untuk diolah secara domestik dengan *smelter* yang dibangun di dalam negara. Produksi nikel yang dikeluarkan menjadi kontrol milik negara dan tidak semena-mena diambil pihak eksternal tanpa adanya otoritas negara secara mendalam. Seperti halnya Susan Strange yang menyebutkan terkait cara produksi sebagai dasar kekuatan dari kelas lainnya. Kekuasaan struktural produksi mengkonsolidasi dan mempertahankan kekuatan negara dalam menetapkan konstitusi, mempertahankan kekuatan politik sosial, dan sebagainya.

Indonesia telah menetapkan regulasinya dalam mengolah produksi nikel untuk diekspor segera dibatasi dengan pengolahan lebih lanjut sebelum

dipasarkan atau didistribusikan pada pasar internasional. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 menyatakan dengan jelas bahwa Indonesia melarang ekspor produksi nikel dengan kandungan dibawah 1,7% (Dwi Najah Tsirwiyati, 2023). Pembatasan ini tentu demi meningkatkan kekuatan struktur produksi Indonesia dalam menentukan apa yang diproduksi oleh Indonesia yaitu berupa hasil tambang nikel yang sedang hangat menjadi perebutan atas kebutuhan nikel pasar dunia. Dengan regulasi aturan yang masih sama ESDM No. 11 2019 juga mewajibkan pembangunan *smelter* sebagai pengolahan lebih lanjut untuk pemurnian nikel dalam meningkatkan nilainya. Pembangunan infrastruktur seperti *smelter* menjadi kunci penting pada struktur produksi Indonesia dalam menguasai pasar global. Penyediaan bahan baku industri merupakan upaya pengimbangan produksi atas dorongan kebutuhan pasokan bahan baku baterai. Indonesia sendiri memiliki target pembangunan *smelter* hingga 30 *smelter* untuk 2023 (Santoso et al., 2023). Target ini selaras dengan kepentingan peningkatan nilai produksi nikel untuk bermain pada pasar internasional dalam struktur produksi Indonesia.

Industri nikel yang berada pada Indonesia tentu tidak sepenuhnya mampu dimiliki Indonesia, terdapat kebutuhan *smelter* yang tidak murah. Maka dari itu terdapat banyak industri besar pada pertambangan nikel Indonesia yang juga dimiliki negara asing seperti yang tercantum pada tabel berikut;

**Tabel 2. 10 Perusahaan Tambang Nikel Terbesar di Indonesia**

<b>Industri Nikel</b>	<b>Asal Negara</b>
PT Vale TBK (INCO)	Kanada
PT Aneka Tambang TBK (ANTM)	Indonesia
PT Central Omega Resources TBK (DKFT)	China
PT Ifishdeco TBK (IFISH)	Indonesia
PT Resource Alam Indonesia TBK (KKGI)	Indonesia
PT Bintang Delapan Mineral	Indonesia
PT Timah	Indonesia
PT Trimegah Bangun Persada (Harita Group)	Indonesia
PT Pam Mineral TBK	Indonesia
PT Harum Energy	Singapura

Sumber: Handayani 2023

Masih terdapat juga industri asing seperti PT Tsingshan milik China yang bahkan juga memasok teknologi *smelter* pada industri-industri nikel di Indonesia tersebut. Meski industri nikel ini banyak berasal dari Indonesia, akan tetapi di dalamnya tidak terlepas dari aktivitas kerja sama asing. Seperti ANTM yang telah dijelaskan kerja sama penanaman modal sebelumnya oleh LG bergandengan dengan IBC dalam penyuplaian bahan baku baterai listrik. Industri Indonesia lainnya juga memperoleh kerja sama asing pada teknologi *smelter* dengan *blast furnace* pada DKFT yang didukung oleh PT Jinsheng milik China yang menambah kepemilikan dari DKFT. Juga, dominasi produksi nikel Indonesia menggunakan teknologi *Rotary Kiln-Electric Furnace* (RKEF) yang mana teknologi *smelter* ini bisa masuk ke dalam industri nikel Indonesia karena kerja sama dari China (Muliawati and CNBC Indonesia 2023). Tidak mau tertinggal, PT Timah juga berupaya meraih kerja sama dengan Outotec Australia sebagai

pemasok teknologi baru *Top Submerge Lance (TSL) Ausmelt Furnace* yang pertama kali hanya digunakan Indonesia di Asia Tenggara. Meski industri ini fokus utamanya adalah pertambangan timah, namun ini juga bentuk pengaruh dari dampak kebijakan hilirisasi nikel yang dianggap sukses dan diikuti jejaknya dalam penambahan nilai pengolahan industri pertambangan Indonesia (wahyudi 2022).

Begitu juga sebaliknya dengan kerja sama Vale pada Indonesia untuk memperkuat kebutuhan daya listrik dari PT PLN milik Indonesia atas “Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL)” dalam proyek Pomalaa atas Proyek Strategi Nasional (PSN) (Vale, 2023). Vale juga menjalin strategi kerja sama atas izin operasi dari pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan pada 2020 dengan fokus optimalisasi kapasitas produksi, peningkatan efisiensi, dan pengurangan biaya. Dimana pada awal tahun 2020 terdampak *Covid-19* dan Vale akan tetap menjalankan aktivitas pertambangan tanpa adanya pemutusan hubungan kerja pada karyawannya dengan protokol kesehatan yang tercantum pada booklet yang dikeluarkan Vale. Vale berkomitmen pada masyarakat lokal untuk menjaga keberlanjutan dan mencegah perambahan lahan dalam memperbaiki kebutuhan masyarakat serta penerapan program yang saling bertimbal balik (Vale, 2020).

Tentu dalam memperkuat struktur produksi Indonesia pada pasar internasional, Indonesia mengerahkan kekuatan perusahaan asing dalam pembangunan. Kerja sama dijalin Indonesia dalam pembangunan produksi bersama perusahaan asing seperti halnya LG yang membangun produksi sel baterai listrik. Tak hanya itu, kemitraan yang dijalin Indonesia beragam pada ranah nikel ini. Kebutuhan baterai pada pasar internasional menjembatani

Indonesia bekerja sama dalam investasi pembangunan *smelter* seperti PT Vale, Sumitomo Metal Mining, Tsingshan Group, GEM co, dan sebagainya seperti yang telah dijelaskan pada bab dua sebelumnya (Dwi Najah Tsirwiyati, 2023). Kekuatan bantuan ini merupakan kemitraan yang dijalin Indonesia dalam memenuhi target pembangunan *smelter*-nya. Indonesia sukses menjalin kerja sama yang sangat besar dalam kebijakannya yang membuktikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kualitas. Jika halnya korporasi tidak bersedia membantu dalam kerja sama tentu akan menempatkan Indonesia dalam kaca mata kompetitor atau musuh nya. Kerja sama yang dijalin Indonesia juga merupakan upaya dalam menguasai teknologi produksi agar dapat terus melaju pada jalur kompetitif pasar internasional. Jalinan kerja sama ini tentu juga melalui regulasi Indonesia atas peraturan yang jelas terkait apa saja yang boleh beroperasi dan pihak mana yang ditolak dalam mengoperasikan industri penambangan nikel. Tidak melupakan dengan masuknya pihak yang diperbolehkan beroperasi dibawah regulasi aturan Indonesia juga berhak mendapatkan kompensasi secara adil. Seperti halnya Indonesia dengan saling mendukung memberikan tunjangan pajak dan juga kemudahan akses pembangunan infrastruktur atas aktivitas kebutuhan industri dalam mempermudah masuknya pengembangan produksi di dalam Indonesia. Ini merupakan bentuk kemenangan Indonesia dalam struktur produksi yang cukup memuaskan, dengan adanya pertumbuhan produksi nikel sebagai negara yang mampu menguasai dan mengendalikan perusahaan industri di dalam domestik untuk bermain pada pasar internasional.

Pengembangan kekuasaan struktur produksi Indonesia tidak hanya meningkatkan nilai produksi, namun juga tetap berinovasi dalam produksi

kepentingan domestik dalam meningkatkan kekuasaan struktural dan juga kepentingan domestik Indonesia. Salah satunya produksi kendaraan tempur (ranpur) “Maung” dari PT. Pindad dengan harga yang cenderung lebih mahal daripada jip militer produksi asing. Hal ini menjadi acuan untuk menambahkan nilai lokal dalam kandungan produksi Pindad. Penggunaan komponen lokal pada maung telah mencapai 73% yang melibatkan 133 perusahaan lokal dalam produksinya dengan target 92% konten lokal nantinya. Maung dengan harga yang masih lebih tinggi dari pada produksi jip militer negara lain terus didorong dengan memilihnya. Meski harga produksi luar negeri lebih murah namun bila menjadi pilihan maka ini tidak akan mendorong *nation building* dan Indonesia tak mendapat keuntungan dalam peningkatan produksi dalam negeri. Pindad sendiri telah merancang maung dengan peruntukan sipil sebagai kendaraan listrik untuk mendorong percepatan kendaraan listrik namun belum mencapai tahap produksi (NurW, 2023). Upaya pengembangan ini masih menjadi awal kekuasaan struktur produksi untuk mengendalikan pasar dengan inovasi teknologi baru namun juga beriringan dengan peningkatan kekuatan keamanan.

Besarnya perubahan dalam meningkatnya struktur produksi Indonesia dengan kebijakan hilirisasi nikel yang memasuki pasar internasional. Menjadikan Indonesia sebagai pemain besar yang baru dalam pasar nikel internasional. Masuknya berbagai dukungan dan jalinan kerja sama tidak lupa diikuti dengan hambatannya dalam memasuki permainan pasar internasional. Dengan sangat jelas bahwa struktur produksi dalam kebijakan hilirisasi nikel menjadi pengaruh yang mampu menyulitkan pihak lain. Uni Eropa dengan kekecewaannya menantang Indonesia dalam gugatannya pada WTO terkait hambatan distribusi

sumber daya alam yang tidak merata. Ini menunjukkan bahwa struktur produksi yang menjadi basis perubahan sosial dan politik yang melintasi batas negara dengan melibatkan kontrol ekonomi yang penting secara global. Pengaruh ini juga tercermin pada gejolak harga nikel yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dengan pasar internasional yang gencar mengembangkan teknologi dengan kebutuhan bahan baku nikel semakin meningkatkan permintaan pasar. Indonesia sebagai negara yang unggul dalam menentukan kondisi perdagangan internasional.

Indonesia sangat paham dalam menentukan apa yang diproduksi dan juga apa yang dapat terjual dalam jumlah banyak. Meski dalam pengembangan produknya masih membutuhkan bantuan pihak luar yang menjadi kekuatan tambahan dalam menghadapi hambatan produksi Indonesia dalam teknologi dan finansialnya. Struktur produksi Indonesia yang menguat ini sebagai hasil gabungan dari kebijakan hilirisasi nikel bersamaan dengan tren kebutuhan pasar dan perubahan teknologi. Upaya dominasi Indonesia pada produksi nikel merupakan kondisi yang harus diwaspadai. Tidak hanya oleh pihak asing, namun juga bangsa sendiri harus sadar atas watak serakahnya para pejabat negara, pegawai negeri, pengusaha, hingga masyarakat umum. Kenyataannya Indonesia menjadi negara paling korup di Asia Pasifik bahkan sejak 2010 atas kasus korupsi yang merajalela (Basyirrasjad, 2022).

### ***3.1.3 Finance***

Kebijakan hilirisasi menciptakan peluang baru dalam meningkatkan ekonomi, dengan adanya kebijakan dan kewajiban pembangunan *smelter* di dalam

domestik. Maka hal ini menjadi sorotan penting atas peningkatan dan pembangunan ekonomi sektor industri. Regulasi pembangunan *smelter* dan percepatan kendaraan listrik menjadikan nikel sebagai sumber pengembangan ekonomi yang pesat. Mulai dari harga nikel yang meningkat atas peningkatan nilai dan juga keterbatasan pasar menjadi salah satu keuntungan Indonesia. Indonesia juga mampu menarik perhatian investor dalam pengembangan sektor tambang dimana hal ini menjadi salah satu kunci dalam mengendalikan kekuasaan struktural yang dimiliki Indonesia.

Dalam pengendalian perkembangan kekuasaan struktural Indonesia yang tidak dapat terlepas dari empat pilar tersebut, Indonesia memainkan peran dalam penarikan aliran modal sebagai uang baru yang dimanfaatkan dari kebijakan hilirisasi. Kebijakan yang menahan ekspor bahan mentah dan menahan nikel mentah untuk melalui proses pemurnian di dalam negeri menarik investor untuk mendanai pembangunan infrastruktur industri pertambangan dengan menjalin kerja sama. Modal besar yang masuk seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya penuh mendorong pembangunan *smelter* dan infrastruktur pendukung industri meningkatkan jalan baru bagi Indonesia untuk menciptakan peluang-peluang yang mampu mendukung perkembangan ekonomi Indonesia. Seperti halnya penciptaan lapangan kerja, peningkatan valuasi ekonomi dan cadangan devisa. Ini merupakan keuntungan terbesar Indonesia dalam memasuki persaingan global melalui bantuan dana yang masuk dan disalurkan pada fasilitas pendukungnya.

Aliran dana yang masuk dan mempengaruhi perkembangan ekonomi juga memicu penyaluran dana pada fasilitas publik melalui perpajakan dan pendapatan

tambahan dari berkembangnya perekonomian Indonesia. Dampak kebijakan Hilirisasi yang mempengaruhi harga nikel dunia juga yang menjadi salah satu dari jalur pendapatan baru bagi Indonesia. Meski pembahasan ini juga ada pada ranah produksi, namun ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia dengan pengaruhnya dapat memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan maksimal dalam pengembangan kekuatan ekonomi dari kebijakan hilirisasi nikel. Dalam asumsi ini, serupa dengan argumen Susan Strange yang mendukung bahwa tidak hanya daya saing perdagangan yang mempengaruhi nilai mata uang, namun juga pergerakan aliran moneter pasar internasional jangka pendek menjadi salah satu penentunya. Aktivitas perdagangan internasional yang menguntungkan Indonesia dari penjualan ekspor nikel dengan nilai yang meningkat menjadikan jembatan transaksi ekonomi internasional atas pertukaran mata uang yang mampu menaikkan nilai mata uang Indonesia.

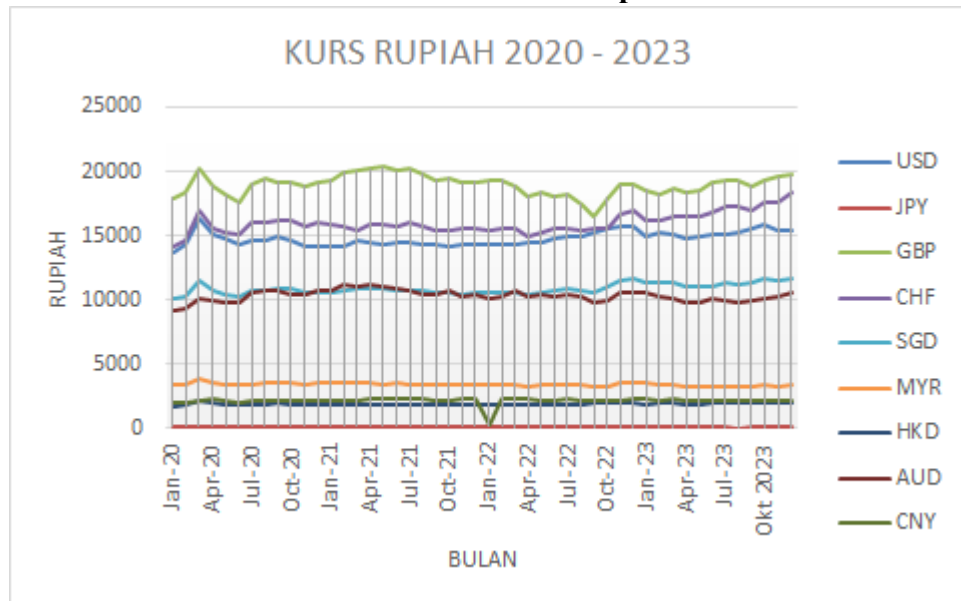
Peningkatan kekuatan keuangan Indonesia dari kerja sama keuangan pada jalur investasi meningkatkan valuasi ekonomi Indonesia. Pendapatan pajak dan tenaga kerja yang turut meningkat akibat serapan aliran modal mendorong peningkatan signifikan. Mulai dari keuntungan PNB, PDRB, PMA, PMDN, dan sebagainya yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, mengalir perekonomian Indonesia (Santoso et al., 2023). Aliran keuangan yang masuk ini seperti darah yang harus mengalir pada seluruh anggota tubuh manusia. Seperti dalam pembahasan Susan Strange bahwa aliran ini harus mampu menjangkau dan memperbarui setiap bagian perekonomian. Ini merupakan aset keuangan yang mampu disalurkan pada perkembangan dan pemanfaatan untuk fasilitas publik. Mulai dari pembangunan jalan raya sebagai akses industri dan juga domestik,

pembangunan infrastruktur pendukung industri seperti sumber energi, peningkatan lapangan pekerjaan, pengembangan inovasi dan keamanan negara, dan masih banyak lagi. Aliran keuangan yang beredar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi sebagai bentuk pemanfaatan kepentingan Indonesia. Meski aliran dana baru yang masuk merupakan kepemilikan asing, namun perlu dipahami bahwa negaralah yang bertanggung jawab dalam mengelola nilai uang dalam otoritasnya yang bersifat nasional.

Besarnya aliran modal yang mengalir perekonomian Indonesia ini juga tidak terlepas dari resiko atas ketidakstabilan ekonomi yang juga besar. Uang yang mengalir ini juga selayaknya meriam pada kapal layar sebagai sumber kekuatan bila dapat dikendalikan namun akan merusak bila halnya tidak terkendali. Maka dari itu kontrol Indonesia terhadap aliran keuangan ini tetap memerlukan kontrol negara secara penuh agar dapat memaksimalkan keuntungannya dan tidak merugikan maupun mengalami kemunduran seperti inflasi, lilitan hutang, dan sebagainya. Mulai dari kontrol regulasi atas perizinan tambang yang jelas dan tidak merugikan terutama wilayah masyarakat area industri, keputusan harus diambil secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa agar mampu mengontrol pengawasan terhadap perkembangan pembangunan ini. Seperti pada dampak lingkungan perusahaan *smelter* PT. *Gunbuster Nickel Industry* (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah yang menciptakan *multiplier effect* pada wilayah daerah dan masyarakat sekitarnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi antara tahun 2021 dan 2023 yang meningkat dari 10,47% mencapai 36,42% pada 2023. Angka kemiskinan yang juga menurun dari 13,90% pada 2021 menurun pada 12,29% untuk 2022 diikuti penurunan pengangguran dari 2,98%

menjadi 2,25%. Industri ini telah menyerap tenaga kerja lokal yang terus berkembang dan mendukung kemajuan ekonomi domestik Indonesia (Prasetyani and Respati 2024). Aktivitas industri pertambangan juga menyerap keuntungan ekonomi dari masyarakat lokal yang menumbuhkan ekonomi berkelanjutan melalui usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) pada area kawasan industri. Peningkatan pada wilayah semacam inilah yang perlu dikontrol dan diawasi negara agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan lebih lanjut sebagai dampak positif.

**Grafik 1. Nilai Kurs Rupiah**



Sumber: Satu Data Perdagangan, 2024

Aktivitas perdagangan pasar nikel yang didominasi Indonesia merupakan bentuk pertukaran devisa negara yang menjanjikan. Namun tampaknya nilai rupiah tidak meningkat secara signifikan. Dari awal mula kebijakan hilirisasi nikel yang mempengaruhi harga pasar seharusnya mampu mendorong peningkatan pada nilai mata uang rupiah. Namun faktanya justru awal tahun 2020 nilai rupiah langsung menurun. Penurunan nilai rupiah dan perubahan mata uang dunia disaat tahun 2020 ini dipengaruhi juga faktor lain seperti *Covid-19* yang berdampak

ekonomi global terganggu. Awal tahun 2020 juga mengarahkan ekonomi Indonesia pada ketidakpastian atas pertumbuhan ekonomi yang memburuk akibat terhambatnya aktivitas ekonomi atas penguncian aktivitas dalam menangani *Covid-19*. Daruratnya pasar dalam periode Maret dan April 2020 menyebabkan depresiasi dan harus menguatkan kembali dalam pemulihan kepercayaan pada investor terhadap pasar (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 2021). Nilai mata uang rupiah yang mengalami penurunan pada awal tahun 2020 merupakan bentuk bahwa kebijakan hilirisasi yang dicanangkan mendongkrak ekonomi masih butuh waktu yang tidak bisa secara instan. Juga ini membuktikan bahwa pengaruh terhadap nilai mata uang melalui perdagangan juga selalu akan ada faktor lain yang mengikuti seperti halnya pandemi kesehatan awal 2020.

Atas penurunan tersebut, maka tahun 2021 Indonesia mendorong pemulihan ekonomi pada “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi” menggunakan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN). Ekonomi Indonesia bertumbuh yang bergantung atas keberhasilan penanganan *Covid-19* dan nilai rupiah cenderung mulai bergerak menguat pada 2021 yang diprediksi akan konsisten untuk tahun kedepannya dengan harus dipantau dengan waspada (Kominfo, 2020). Keberhasilan peningkatan nilai rupiah ini merupakan bentuk tanggung jawab negara sebagai otoritas pengelola mata uang nasional untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Meski harga nikel yang melonjak pada pasar atas kebijakan hilirisasi nikel, namun nilai rupiah masih dapat terdampak dari faktor lain. Pasar mungkin berdampak secara global, namun otoritas negaralah bersifat nasional yang harus memperbaiki nilai mata uang nya.

Ini juga menjelaskan struktur keuangan merupakan hasil dari sejumlah kebijakan pada berbagai sektor, tidak dapat diakibatkan hanya dari satu kebijakan yang pasti akan mempengaruhinya.

Regulasi dan pengawasan dari kontrol negara atas perekonomian sangatlah diperlukan dalam menjaga ketimpangan ekonomi juga sebagai kontrol negara atas tuntutan mengatasi kesenjangan dan menjaga kesejahteraan masyarakatnya. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, maka ditakutkan akan adanya ketergodaan atas eksploitasi dalam meningkatkan keuntungannya sendiri. Bila ditemukan ada pihak yang menikmati keuntungan ekonomi secara tidak terkendali hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi dari sumber daya produktif yang tidak terpakai. Kepentingan Indonesia untuk turut mensejahterakan masyarakat juga sangat jelas tercantum pada UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 sebagai implementasi pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan rakyatnya (Deddy, Adriyanto, and Andreas N, 2023).

Sangat disayangkan bila kepentingan tersebut seringkali dikorbankan oleh pemerintahannya sendiri. Rakyat berpendidikan rendah seharusnya bisa mendapat lebih atas anggaran pendidikan dan kesehatan yang jelas. Anggaran pendidikan dan kesehatan sering menjadi korban sejak krisis moneter dari pelunasan utang Indonesia sejak 2011 (Basyirryad, 2022).

#### ***3.1.4 Knowledge***

Pengetahuan merupakan suatu hal yang paling dicari dalam kekuasaan struktural sebagai jalur memperoleh kekuatan dan memperkuat struktur lainnya. Meski kekuatan ini sering menjadi yang paling terabaikan namun menjadi penting

dalam memahami apa yang diketahui dan juga cara mengkomunikasikannya. Pengetahuan tidak bisa diukur dan juga siapapun dari mereka adalah penting sekalipun tidak memilikinya.

Peningkatan pembangunan *smelter* sebagai teknologi pengembangan pengolahan nikel untuk peningkatan nilai menjadikan kekuatan baru yang ditingkatkan Indonesia. Kewajiban pembangunan *smelter* di dalam domestik mengembangkan kemajuan infrastruktur atas dorongan pihak eksternal atas *smelter* di dalam wilayah domestik. Peristiwa ini terjadi atas dorongan dari kebijakan hilirisasi nikel yang menjadi dasar perkembangannya (Dwi Najah Tsirwiyati, 2023). Indonesia berupaya menentukan arah kebijakan untuk kepentingan nasional sebagai bentuk kekuatan dari kekuasaannya. Kontrol Indonesia atas aturan kewajiban pembangunan *smelter* di dalam negeri untuk pemurnian dalam pembatasan ekspor menjadi suatu bentuk atas kendali Indonesia terhadap teknologi. *Smelter* merupakan salah satu teknologi yang masih minim untuk dimiliki Indonesia, namun dengan kebijakan ini, Indonesia mampu memiliki akses atas teknologi *smelter* agar lebih banyak dan juga membuka jalur lahan baru atas ketenagakerjaan, kenaikan ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya.

**Tabel 3. Penggunaan Teknologi *Smelter* dan Asal Teknologi**

No.	Industri Nikel	Teknologi <i>Smelter</i>	Asal Teknologi Negara
1.	PT Vale TBK (INCO)	RKEF	Kanada, China
		HPAL	China (Zhejiang Huayou), Jepang (Sumitomo Metal Mining)

No.	Industri Nikel	Teknologi Smelter	Asal Teknologi Negara
2.	PT Aneka Tambang TBK (ANTM)	RKEF	China (CATL, Hongkong CBL Ltd 'HKCBL')
		HPAL	China (CATL)
3.	PT Ifishdeco TBK (IFISH)	Blast Furnace, RKEF	China (Pan China Group, Tekindo Group, Bintang Smelter Indonesia )
4.	PT Gunbuster Nickel Industry (GNI)	RKEF	China (Tsingshan)
5.	PT Central Omega Resources TBK (DKFT)	Blast Furnace	China (PT Jinsheng)
6.	PT Indonesia Weda Bay Nickel	RKEF	China (Huake),
		HPAL	China (Huafei)
7.	PT Bintang Delapan Mineral	RKEF	China (Tsingshan)
8.	PT Trimegah Bangun Persada (Harita Group)	RKEF	China (Zhejiang Lygend Co. Ltd)
		HPAL	China (Lygend Resources Technology Co. Ltd)
9.	PT Pam Mineral TBK (NICL)	HPAL, APAL	Papua Nugini (PNG)
10.	PT Harum Energy	HPAL	Singapura (Westrong Metal Industry),  Indonesia (Blue Sparking Energy)

Sumber: Olahan Data Penulis Dari Berbagai Sumber

Teknologi *smelter* industri nikel yang berada di Indonesia diperoleh dari negara lain. Ini merupakan akses terhadap teknologi yang mampu Indonesia peroleh melalui kewajiban pembangunan *smelter* di dalam domestik dalam pengolahan dan pelarangan ekspor nikel melalui kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia. Masih terdapat juga sejumlah *smelter* dengan teknologi RKEF dari Tsingshan yang beroperasi pada PT Cahaya Smelter Indonesia (CSID), PT Bukit Smelter Indonesia (BSID), dan PT Zhao Hui Nickel (ZHN) yang beroperasi pada

area strategis Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) (Merdeka Battery Materials, 2024). Kebanyakan pengolahan *smelter* di Indonesia menggunakan teknologi pengolahan RKEF yang mana juga didominasi teknologi ini didukung oleh China sebagai pemasok teknologinya. China merupakan dominasi besar teknologi *smelter* yang dipilih Indonesia karena dinilai murah pada bisnis industri. Dengan begitu maka dampak dari kebijakan hilirisasi ini juga sejatinya sangat menguntungkan China, terlebih saat tujuan ekspornya juga didominasi oleh China. Namun, dengan pembangunan industri tersebut, tentu juga ada penerimaan pajak yang lebih besar juga (Muliawati and CNBC Indonesia 2023). Indonesia melihat teknologi *smelter* sebagai pusat akses produksi dalam bermain dan bersaing dengan negara lain pada pasar internasional. Yang mana mempengaruhi hubungan internasional dengan bentuk baru.

Tentu sudah jelas bahwa ini menjelaskan juga bahwa struktur pengetahuan akan selalu terikat dengan struktur lainnya dan juga begitu sebaliknya. Tidak hanya sebatas pembangunan *smelter* yang meningkat sebagai perkembangan teknologi, namun juga ini dimanfaatkan sebagai pintu baru dalam melakukan inovasi. Nikel sendiri sebagai bahan baku pembuatan baterai dikembangkan bersama struktur keamanan Indonesia dalam kendaraan tempur elektrik “Maung” yang bahkan juga masih dikembangkan lagi dalam peruntukan kendaraan sipil. Meski masih dalam tahap pengembangan dan harga yang masih cenderung lebih mahal, namun Indonesia berupaya menekan produksi penggunaan komponen produk domestik dalam memangkas biaya produksi penggunaan barang bahan baku impor (NurW, 2023). Beberapa penjelasan dalam pendekatan ini dapat

dikatakan bahwa Indonesia juga melihat teknologi digunakan dalam bentuk persaingan antar negara dalam menekan produktivitas Indonesia.

Pengembangan teknologi *smelter* yang besar ini tentu tidak mudah untuk keterbatasan dana Indonesia yang masih membutuhkan aliran dana modal. Maka dari itu struktur keuangan juga tidak terlepas atas kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan pihak-pihak investor sebagai pendanaan penyedia akses teknologi. Tak hanya sebatas dalam pengembangan “*smelter*” sebagai teknologi, namun juga industri terkait seperti baterai seperti LG, Panasonic, dan sebagainya yang menanamkan modal dalam pembangunan industri sel baterai. Contoh pendanaan modal ini merupakan suatu bentuk dalam akses keuangan yang mampu menjadi kekuatan Indonesia dalam menarik modal besar dalam aliran keuangan. Tentu dalam kerja sama Indonesia dan para investor sebagai aliran modal terjadi dalam ranah pasar internasional yang saling mempengaruhi. Pengetahuan memiliki sifat yang khusus atas perolehannya, tidak sebatas dari usaha sendiri namun dari pihak lain. Ini juga berlaku pada akses struktur lain yang saling menopang satu sama lain.

Perkembangan teknologi menjadikan kekuatan negara lebih terkonsentrasi. Terpusatnya kekuasaan merubah persaingan negara yang awalnya bagaimana kekuatan negara dalam perebutan wilayah menjadi kompetisi kepemimpinan. Simetri kesetaraan antar negara dalam perolehan akses pengetahuan juga meningkat seperti dari bahasa sebagai jembatan komunikasi dan informasi. Pengetahuan memberikan distribusi kekuatan yang berpindah pada kekayaan atas informasi bukan sebatas kekayaan modal (Strange, 2015). Dimana bila Indonesia mampu menarik modal investor dalam pembangunan *smelter*, akan mampu

mendapat akses teknologi yang menjadi salah satu kunci pada pintu akses dari teknologi dan pengetahuan. Akses yang didapat melalui pemanfaatan asing sangat diperuntukkan bagi kelas atas. Masyarakat biasa kelas menengah kebawah masih kerap sulit untuk mendapatkan pendidikan dan juga kesejahteraannya bila Indonesia sendiri tidak melakukan perubahan atas pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Rakyat kecil tidak mampu memperoleh penghasilan dalam bermain peran pada keterbatasan pendidikan mereka, dan juga sulitnya menyambung hidup atas lapangan pekerjaan yang sulit diperoleh dalam batas pendidikan serta kemampuannya (Basyirasyad, 2022)..

### **3.2 Hasil Analisis**

Berdasarkan penelitian tersebut, dengan menganalisis dampak dari kebijakan hilirisasi nikel Indonesia menggunakan konsep “Struktural Power” dari Susan Strange, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan struktural Indonesia mengalami beberapa peningkatan pada tiap pilar strukturnya yang dirangkum pada tabel berikut :

**Tabel 4. Perbandingan Kekuasaan Struktural Sebelum dan Sesudah Kebijakan Hilirisasi Nikel**

<b>Kekuasaan Struktural Indonesia</b>	<b>Sebelum Kebijakan</b>	<b>Setelah Kebijakan</b>
Security	Kekuatan militer Indonesia merupakan salah satu yang paling kuat pada kawasan ASEAN namun masih belum memperhatikan modernisasi peralatan tempur.	Peningkatan kekuatan alutsista kendaraan tempur Maung sebagai teknologi dan inovasi atas pemanfaatan kebijakan hilirisasi dan percepatan kendaraan elektrik berbasis baterai listrik. Perhatian pada pengamanan objek vital industri pertambangan menjadi salah satu urgensi penting akibat kebijakan yang membatasi ekspor nikel mentah sebelum melalui pengolahan lanjut.
Production	Produksi nikel masih terpaku pada ekspor bijih nikel mentah dan juga industri pengolahannya masih belum berkembang. Pengolahan mineral dari bahan mentah masih terbatas pada penambangan langsung dan dijual langsung dalam ekspor.	Peningkatan nilai tambah dari produksi nikel dan juga pembangunan infrastruktur pengolahan <i>smelter</i> dengan bantuan pihak asing meningkatkan kapasitas produksi domestik. Banyak kerja sama industri menjalin hubungan pembangunan dan memenuhi kepentingannya masing-masing. Terutama akses produksi nikel.
Finance	Stabilitas ekonomi Indonesia masih rentan meski kebijakan moneter dan fiskalnya cukup stabil. Ketergantungan ekonomi Indonesia cukup terbatas karena kurangnya ketertarikan investasi asing terutama sektor industri nikel.	Investasi asing banyak menghujani industri nikel Indonesia. Indonesia sendiri memperoleh sejumlah uang tambahan melalui pajak atas banyaknya <i>smelter</i> baru yang di bangun oleh berbagai pihak secara domestik. Juga terkait pendapatan dari sektor hilir nikel meningkatkan cadangan devisa negara bersamaan dengan masuknya investasi tersebut. Meski masih dapat dipengaruhi dari segi faktor lain seperti kesehatan saat <i>Covid-19</i> melanda pada awal 2020, dan juga tanggung jawab pelunasan utang negara

<b>Kekuasaan Struktural Indonesia</b>	<b>Sebelum Kebijakan</b>	<b>Setelah Kebijakan</b>
Knowledge	Teknologi pengolahan nikel sendiri masih minim, terutama pada <i>smelter</i> dan akses terhadap <i>smelter</i> masih belum mampu untuk diperbanyak secara mandiri oleh Indonesia.	Masuknya transfer teknologi yang mengisi industri nikel melalui <i>smelter</i> dari kerja sama berbagai pihak terkait untuk memiliki akses pengolahan nikel dengan dominasi keterlibatan negara China sebagai pemilik akses teknologi <i>smelter</i> yang digunakan Indonesia.

Kebijakan hilirisasi nikel menghasilkan dampak besar pada peningkatan kekuasaan struktural Indonesia. Meski masih terdapat kelemahan dari Indonesia sendiri yang belum mampu mengendalikannya secara mandiri. Tentu peningkatan empat struktur ini tidak mudah, dan masih menghadapi tantangan dan hambatan lain pada tiap strukturnya. Namun ini masih merupakan bentuk peningkatan yang cukup besar dari pada sebelum adanya kebijakan hilirisasi. Kelemahan empat pilar struktur Indonesia terkait akses akhirnya dapat didorong melalui kebijakan hilirisasi nikel pada tahun 2020 untuk memperkuat kekuasaan struktural Indonesia yang mempengaruhi hubungan otoritas dan pasar.

Namun Indonesia juga harus tetap bersiaga pada gelombang pemanfaatan dan ketergantungan pada pihak asing. Meski terdapat peningkatan pada kekuasaan struktural Indonesia, namun peningkatan yang didorong oleh bantuan asing tentu mengindikasikan adanya kekuasaan lebih di atas Indonesia. China sebagai pihak yang paling banyak menerima ekspor nikel dan juga berinvestasi di Indonesia merupakan pihak yang lebih diuntungkan dari kebijakan hilirisasi nikel Indonesia. Terlebih pengolahan teknologi *smelter* banyak dibeli dari China yang dianggap murah sehingga mendominasi di Indonesia. Pihak asing juga mendapat insentif pembebasan pajak ekspor nikel yang mengurangi keuntungan Indonesia atas

penerimaan meningkatnya nilai nikel. Seharusnya ini juga menjadi urgensi kewaspadaan yang terus diperhatikan, terlebih industri pertambangan yang besar seringkali dimanfaatkan pihak oknum seperti kasus PT. Timah yang sering dibuka media terkait korupsi dan kerugiannya. Indonesia juga harus bisa belajar dari PT. Freeport yang telah dimiliki pihak asing bertahun-tahun dan dikeruk habis tanpa menikmati hasilnya (Hermawan and Auliani 2024).

Kebijakan ini memang mendorong peningkatan kekuasaan struktural Indonesia meski dengan bantuan pihak terlibat. Dengan adanya kebijakan hilirisasi yang memiliki dampak peningkatan pada kekuasaan struktural Indonesia, tentu Indonesia masih bergantung dengan lapisan kekuasaan di atasnya. Bahkan juga Uni Eropa merupakan lapisan yang lebih di atas Indonesia hanya saja tidak bisa ditunggangi dan menjadi kontra pada Indonesia. Kebijakan ini juga salah satu bentuk pemanfaatan potensi yang turut menguatkan kekuasaan struktural. Bukan berarti menjadi satu-satunya cara, melainkan salah satunya yang memang memiliki potensi di dalamnya.

Indonesia harus mampu memberi batasan kekuasaan pada industri besar dan tidak boleh selalu bergantung dari penanaman modal. Terlebih kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus diperhatikan pada seluruh BUMN dan birokrasi. Karena itu, kesalahan Indonesia dalam “salah urus” terlalu memihak kelas atas dan seharusnya diorientasikan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Basyirrasjad, 2022).

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Kebijakan hilirisasi nikel yang diberlakukan Indonesia merupakan bentuk penguatan industri tambang mineral dalam menjaga pasokan cadangan nikel dunia dan juga memperkuat perkembangan negara. Indonesia yang menghambat keluarnya nikel sebagai bahan mentah untuk diekspor, berupaya meningkatkan nilai hasil tambang nikel melalui pemurnian sebelum didistribusikan pada pasar. Dengan tujuan inilah Indonesia mencari peluang keuntungan maksimal dengan terlibat oleh pihak-pihak asing dalam menjalin hubungan kerja sama internasional. Kebijakan yang dilakukan Indonesia tidak hanya mempengaruhi perkembangan domestiknya, namun juga mempengaruhi wilayah eksternal seperti dari terbatasnya distribusi nikel pada pasar dunia bersama dengan gejolak harga nikel, terganggunya aktivitas industri kawasan Eropa hingga keterlibatan WTO, dan jalinan kerja sama atas tiap kepentingan masing-masing negara dan industri. Tentu ini menunjukkan Indonesia memiliki kekuatan yang mampu berpengaruh dalam dunia internasional. Kekuatan ini tentu tidak sebatas dari kebijakannya saja, namun kebijakan inilah yang memicu dan menunjukkan bahwa terdapat struktur-struktur yang mempengaruhi kekuatan Indonesia.

Kekuasaan struktural Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia mampu menentukan dan mempengaruhi ekonomi politik internasional bersama dengan negara-negara, perusahaan industri, dan juga para ahli yang berperan dalam

jalanan hubungan ekonomi politik internasional. Indonesia membentuk kerangka kerja antar negara dalam hubungan antar masyarakat, perusahaan, dan juga kepentingan politik. Kekuatan ekonomi dikatakan dalam buku Susan Strange “akan semakin besar jika hanya mereka yang mampu menjualnya”. Dimana dalam konteks ini adalah Indonesia yang membatasi nikel berupaya meningkatkan ekonomi dengan pembatasan distribusi nikel pada pasar dunia dengan cadangan terbesarnya di dunia. Namun tidak boleh dilupakan bahwa kekuasaan struktural Indonesia bekerja dengan pengaruh empat struktur yang saling menopang dan tidak dapat berdiri secara tunggal. Indonesia tidak akan meningkatkan produksi tanpa adanya pengaruh keuangan dan juga teknologi. Juga inovasi dalam penguatan keamanan tidak akan berlangsung tanpa adanya inovasi, produksi, dan juga keuangan. Dan begitu pula seterusnya, dimana keempat struktur ini saling berkaitan, yaitu; struktur keamanan, struktur produksi, struktur keuangan, dan struktur pengetahuan.

Struktur keamanan Indonesia dalam pengaruh kebijakan hilirisasi nikel merupakan satu kepentingan industri dalam menjaga keamanan wilayah sumber daya alam sebagai salah satu objek vital negara. Nikel sebagai sumber daya alam di Indonesia merupakan cadangan terbesar di dunia. Dimana sumber daya ini perlu dijaga secara maksimal agar tidak dimanfaatkan secara ilegal dan dicuri oleh pihak asing. Indonesia dalam penjagaannya juga melakukan patroli wilayah industri tambang untuk mencegah adanya penambangan ilegal dan pencurian sumber daya alam. Dimana ini merupakan bentuk perlindungan militer negara dalam menjaga objek vitalnya, seperti saat penangkapan penyelundup nikel seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa keamanan

selalu menjadi peran penting dalam menjalankan kedaulatan negara dan harus selalu ditingkatkan. Dapat dikatakan bahwa struktur keamanan juga dipengaruhi oleh perubahan teknologi persenjataan dan juga produksinya. Dengan begitu industri juga berperan penting sebagai kunci dalam kendali struktur keamanan dan saling mempengaruhi.

Struktur lain dari dampak kebijakan hilirisasi nikel adalah produksi. Produksi merupakan kekuatan Indonesia dalam kontrol industri nikel agar semakin berkembang dan menguntungkan. Tentu struktur ini tidak dapat berjalan sendiri, dimana perkembangan produksi nikel Indonesia juga dipengaruhi oleh masuknya modal sebagai pintu pembangunan *smelter* juga teknologi dan para ahli di dalamnya. Struktur ini juga bermain mempengaruhi dalam pasar dunia seperti dalam distribusi dan juga tenaga kerja industri yang terlibat. Indonesia memastikan bahwa produksi nikel yang dimurnikan dapat terjual dengan jumlah yang banyak. Perubahan ini melalui kepentingan pasar domestik yang menjadi pasar internasional dengan menggunakan kekuatan korporasi asing dalam memperkuat negara. Meski industri produksi juga memiliki resiko, namun negara lah yang memiliki tanggung jawab dan otoritas penuh atas ini. Negara memainkan kartunya dengan menyusun regulasi izin tambang terkait industri mana yang boleh beroperasi dan mana yang dilarang.

Struktur keuangan menjadi kunci awal pengembangan dari dampak kebijakan hilirisasi nikel. Upaya Indonesia tidak akan berjalan mulus tanpa adanya aliran uang baru untuk melakukan pembelian dan pengembangan teknologi *smelter* dalam produksi dengan menjalin kerja sama pihak asing. Kerja sama yang dijalin Indonesia memungkinkan modal mengalir seluruh ekonomi

Indonesia yang dimanfaatkan dalam segala hal termasuk produk publik untuk rakyatnya. Kontrol atas keuangan yang memasuki Indonesia tidak sebatas bahwa sekedar meminjam, namun juga menunjukkan bahwa Indonesia dapat dipercaya dalam mengembangkan modal tersebut menjadi keuntungan maksimal. Ini menunjukkan kekuatan Indonesia tetap berpengaruh meski kebutuhan keuangan masih memanfaatkan modal asing. Dalam masuknya modal asing tentu negaralah yang bertanggung jawab atas masuknya aliran dana ini agar tidak terbuang sia-sia dan bermanfaat. Keuangan akan menjadi senjata yang kuat apabila dapat terkendali, maka dari itu kontrol negara atas masuknya aliran keuangan sangatlah diperlukan. Maka dari itu keuangan mampu mempengaruhi struktur lain seperti produksi dan juga teknologi sebagai modal pembangunannya.

Struktur terakhir ialah pengetahuan, dimana menjadi yang terabaikan namun sangat berpengaruh penting dalam kekuasaan struktural lainnya. Terdapat teknologi, pengetahuan, dan juga para ahli di dalamnya. Kekuatan ini berfokus pada negara dalam memandang teknologi dalam mempengaruhi hubungan antar negara. Pengembangan teknologi dalam dampak kebijakan hilirisasi nikel dapat terlihat terutama pada pengembangan *smelter* yang menjadi pusat hilirisasi nikel. Pengembangan *smelter* sebagai kekuatan Indonesia dapat dipertahankan jika Indonesia mampu membatasi akses tersebut untuk bersaing dalam dunia internasional. Kekuatan ini menjadi jenis kekuatan yang khusus dalam memperkuat Indonesia dalam posisi istimewa sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dan dapat dimainkan dalam pasar internasional. Dengan pengetahuan dan teknologi juga selalu memunculkan inovasi baru agar dapat selalu diperkuat sebagai teknis utama dalam kekuatan pengetahuan.

Dari keempat struktur ini menjadikan kekuatan Indonesia mengalami peningkatan sebagai dampak dari kebijakan hilirisasi nikel. Empat strukturnya saling menopang dan tidak dapat berdiri dengan sendirinya, tidak ada yang dapat menjadi dominasi secara tunggal sebagai kekuatan. Meski masih ada kelemahan pada strukturnya, namun ini menjadi bukti bahwa struktur lain yang menopang dapat saling mengisi dan meningkatkan satu sama lain. Indonesia dengan keterbatasan keuangannya masih mampu mendapatkan aliran modal sebagai kekuatan yang mampu meningkatkan tiap-tiap strukturnya. Kekuasaan struktural Indonesia menentukan hubungan antara otoritas dan pasar bagaimana kekuatan Indonesia digunakan dalam membentuk ekonomi politik. Jawaban dari penelitian ini sebagai dampak kebijakan hilirisasi nikel Indonesia adalah peningkatan kekuasaan struktural Indonesia pada masing-masing strukturnya. Penelitian ini juga dilakukan dalam pemeriksaan kekuasaan untuk mencari solusi dan deskripsi atas kebijakan.

## **4.2 Rekomendasi**

Penelitian ini menemukan hasil dari dampak kebijakan hilirisasi nikel terhadap kekuasaan struktural Indonesia. Penelitian lanjutan masih mungkin untuk dilakukan dalam menyempurnakan lebih lanjut terkait pembahasan kebijakan hilirisasi nikel dan juga kekuasaan struktural Indonesia. Harapan penelitian lanjutan yang dilakukan dapat menemukan pembahasan baru pada kekuasaan struktural Indonesia nantinya terutama dengan keberlanjutan pemerintahan yang baru. Kebijakan hilirisasi nikel yang menjadi batas penelitian dalam kekuasaan

struktural Indonesia dapat dilihat lebih luas dari sudut pandang lain dan juga faktor lain dalam menganalisis kekuasaan struktural yang dimiliki Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisuryo, Dendi. 2023. "Lost in Nickel Lawsuit at the WTO, Indonesia Forced to Export Raw Nickel?" *ADCO Law*, March 7, 2023.  
<https://adcolaw.com/blog/lost-in-nickel-lawsuit-at-the-wto-indonesia-force-d-to-export-raw-nickel/>.
- Admin Nikel.Co.Id. 2022. "Dirut PT PAM Mineral Tbk: Masa Depan Industri Nikel Ada di Limonite." *Media Nikel Indonesia*.  
<https://nikel.co.id/2022/03/01/dirut-pt-pam-mineral-tbk-masa-depan-industri-nikel-ada-di-limonite/>.
- Agussalim, Muhammad S., Ariana, Ramlah Saleh, Ilmu Politik Universitas Hassanuddin Indonesia, and Ilmu Perikanan Universitas Sembilanbelas November Kolaka Indonesia. 2023. "Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel Di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan." *Jurnal of Social Religion Research* 8, no. 1 (April): 37-48.  
<http://10.24256/pal.v8i1.3610>.
- Alamsyah, Agustang, Arlin Adam, and Andi Alim. 2021. "Partisipas Teritorial Masyarakat Lingkar Tambang Morosi Kabupaten Konawe." *Seminar Nasional Hasil Penelitian 2021*. 978-623-387-014-6.
- Allison, Graham T. 1971. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. N.p.: Little, Brown.
- Anisatul Umah. 2021. "Hyundai & LG Bangun Pabrik Baterai EV di RI, Ini Peran IBC." *CNBC Indonesia*, July 30, 2021.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210730164706-4-264972/hyundai-lg-bangun-pabrik-baterai-ev-di-ri-ini-peran-ibc>.
- Anisatul Umah, and CNBC Indonesia. 2020. "Vale Bangun Smelter HPAL, Produknya Bakal Diekspor ke Jepang?" *CNBC Indonesia*.  
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20201016125819-17-194864/vale-bangun-smelter-hpal-produknya-bakal-diekspor-ke-jepang>.
- Asiatoday. 2021. "Uni Eropa Butuh Nikel Indonesia." *AsiaToday.id*.  
<https://asiatoday.id/read/uni-eropa-butuh-nikel-indonesia>.
- Asmarini, Wilda, and CNBC Indonesia. 2021. "Harga Nikel Dunia Bergantung pada Indonesia!" *CNBC Indonesia*, August 19, 2021.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210819125645-4-269603/harga-nikel-dunia-bergantung-pada-indonesia>.
- Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 2021. "Ekonomi RI 2020 Merosot Tajam Akibat Pandemi, Apa Kabar Ekonomi RI 2021?" *bemfeb-unud.com*.  
<https://bemfeb-unud.com/2021/03/08/ekonomi-ri-2020-merosot-tajam-akibat-pandemi-apa-kabar-ekonomi-ri-2021/>.
- Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia. 2024. "Kurs Transaksi BI." *Bank Indonesia*.  
<https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx>.
- Basyirrasjad, Musoffa. 2022. "Menemukan Kembali Indonesia." *LP2M UIN Gusdur*. <https://lp2m.uingusdur.ac.id/menemukan-kembali-indonesia/>.
- Bekarekar, Wirda W. 2016. "Alasan Indonesia Dalam Melakukan Hubungan Kerjasama Dengan Melanisian Spearhead Group (MSG)." *Research Repository UMY*, (Desember).  
<https://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8608>.

- Cahyani, Novi R. 2023. "Kebijakan Pemberhentian Ekspor Bijih Nikel Indonesia Tahun 2020: Tinjauan Neomerkantilisme." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6, no. 2 (Mei). <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i2.2463>.
- Citradi, Tirta, and CNBC Indonesia. 2021. "Seng Ada Lawan! Harga Nikel Reli Non-stop Sejak April 2020." *CNBC Indonesia*, January 13, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210113093127-17-215528/seng-ada-lawan-harga-nikel-reli-non-stop-sejak-april-2020>.
- Darmawan, Erlangga S., and Agung D. E. 2023. "Mengenal Berbagai Macam Teknologi Smelter Nikel hingga Prosedur Keamanannya, Seperti Apa Cara Kerjanya? Halaman all - Kompas.com." Kompas Money. <https://money.kompas.com/read/2023/10/16/141700026/mengenal-berbagai-macam-teknologi-smelter-nikel-hingga-prosedur-keamanannya?page=all>.
- Deddy, Muhammad A., Agus Adriyanto, and R. D. Andreas N. 2023. "Strategi Hilirisasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Cadangan Devisa Negara." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 3 (Juli). 10.58258/jisip.v7i1.5137/<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.
- Donny Yoegiantoro, Nugroho A. Sasongko, Nurbaiti, and Budiaan S. Arifianto. 2021. "Kajian Energi dan Pertahanan Dalam Pengolahan Nikel." *Laporan Penelitian*. [http://repository.idu.ac.id/2927/1/Hasil%20Laporan%20Penelitian\\_Kajian%20Energi%20dan%20Pertahanan%20dalam%20Pengelolaan%20Nikel.pdf](http://repository.idu.ac.id/2927/1/Hasil%20Laporan%20Penelitian_Kajian%20Energi%20dan%20Pertahanan%20dalam%20Pengelolaan%20Nikel.pdf).
- Eryan, Adrianus, Andreas Marbun, Antonius A. Nugroho, and Gabrielle Jane. 2019. *Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Pertama ed. Jakarta Selatan: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). <https://docplayer.info/172448353-Arah-baru-kebijakan-penegakan-hukum-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya.html>.
- Fauziyyah, Putri Z., and Arie K. Paksi. 2023. "Dampak Kerjasama Indonesia-China Dalam Proyek Investasi Nikel Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kedua Negara." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 7, no. 1 (Februari). <https://doi.org/10.38043/jids.v7i1.4279>.
- Fitriyani, Aliyyah D. 2022. "Hilirisasi Bahan Tambang: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." Sekretariat Kabinet. <https://setkab.go.id/hilirisasi-bahan-tambang-sebuah-upaya-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat/>.
- Florentin, Vindry. 2024. "Apa Dampak Anjloknya Harga Nikel - Ekonomi dan Bisnis." Koran TEMPO. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/486842/apa-dampak-anjloknya-harga-nikel>.
- Fraser, Jake, Jack Anderson, Jose Lazuen, Ying Lü, Oliver Heathman, Neal Brewster, Jack Bedder, Oliver Masson, and Roskill Information Services. 2021. *Study on Future Demand and Supply Security of Nickel for Electric Vehicle Batteries: External Study Performed by Roskill for the Joint Research Center*. N.p.: Publications Office of the European Union.

- G, Rakha A., Jupriyanto, George R. Deksono, Sovian Aritonang, and M. T. Ramadhan. 2023. "Strategi Penegakan Kebijakan Hilirisasi Nikel Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Domestik dan Kemandirian Industri Pertahanan." *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10 (7): 3305-3311. 10.31604/jips.v10i7.2023. 3305-3311.
- Gitiyarko, Vincentius. 2021. "Alutsista dan Kekuatan Militer Indonesia." Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2021/05/26/alutsista-dan-kekuatan-militer-indonesia>.
- Hakim, Lukman N. 2024. "Antam Targetkan Smelter untuk Proyek Baterai Mulai Dibangun 2025." *Ekonomi*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240326/44/1752747/antam-targetkan-smelter-untuk-proyek-baterai-mulai-dibangun-2025>.
- Handayani, Lili. 2023. "Inilah 10 Perusahaan Tambang Nikel Terbesar di Indonesia, Apa Saja?" *Media Nikel Indonesia*. <https://nikel.co.id/2023/11/15/inilah-10-perusahaan-tambang-nikel-terbesar-di-indonesia-apa-saja/>.
- Handoyo. 2023. "Menilik Sejumlah Kesepakatan Besar Investasi di Industri Nikel Indonesia." *industri kontan*. <https://industri.kontan.co.id/news/menilik-sejumlah-kesepakatan-besar-investasi-di-industri-nikel-indonesia>.
- Helmy, Army F. 2016. "Pengamanan Objek Vital Nasional Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan." *Badamai Law Journal* 1, no. 2 (September). 10.32801/damai.v1i2.1820.
- Hermawan, Rezky, and Palupi A. Auliani. 2024. "Hilirisasi Nikel, Siapa Lebih Diuntungkan? Halaman all - Kompas.com." *Kompas Money*, March 22, 2024. <https://money.kompas.com/read/2024/03/22/194645926/hilirisasi-nikel-siapa-lebih-diuntungkan?page=all>.
- Ika, Syahriir. 2017. "Kebijakan Hilirisasi Mineral: Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara." *Kajian Ekonomi & Keuangan* 1 (1). <file:///D:/Documents/Downloads/admin,+259-561-1-CE+final.pdf>.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 2020. "Peluang Investasi Nikel Indonesia," Keunggulan Indonesia di Sektor Pertambangan. Kementerian ESDM. <https://www.esdm.go.id/assets/booklet/tambang-2020/Booklet-Nikel-FA.pdf>.
- Kementria Perdagangan Republik Indonesia. 2024. "Nilai Tukar Mata Uang Asing Terhadap Rupiah." Satu Data Perdagangan. <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-dalam-negeri/nilai-tukar>.
- Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama. 2020. "Hilirisasi Nikel Ciptakan Nilai Tambah dan Daya Tahan Ekonomi." *ESDM*, October 14, 2020. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hilirisasi-nikel-ciptakan-nilai-tambah-dan-daya-tahan-ekonomi>.
- Kominfo. 2020. "Pemulihan Ekonomi Nasional Jadi Prioritas APBN 2021." Kominfo.

- <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28589/pemulihan-ekonomi-nasional-jadi-prioritas-apbn-2021/0/berita>.
- Limanseto, Haryo, and Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2023. "Menko Airlangga: Indonesia Bertekad Menjadi Global Key Player Industri Hilirisasi Berbasis Komoditas." *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*, October 10, 2023. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5420/menko-airlangga-indonesia-bertekad-menjadi-global-key-player-industri-hilirisasi-berbasis-komoditas>.
- Lutfi, Ervina. 2023. "Bentuk Globalisasi Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia." Mekari. <https://www.talenta.co/blog/globalisasi-ekonomi-2/>.
- Merdeka Battery Materials. 2024. "Di pusat kegiatan operasi MBMA terdapat smelter Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF) yang sangat menguntungkan dan terdepan, berlokasi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang strategis." Merdeka Battery Materials. <https://merdekabattery.com/id/business/rkef-smelters>.
- Muhammad Muhammad, and Emmanuel A. Adi. 2022. "Peningkatan Investasi Dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6 (Maret). 10.36312/jisip.v6i1.3085/<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.
- Muliawati, Firda D. 2024. "RI & China Kerja Sama Garap Proyek Baterai EV, Ini Kabar Terbaru." CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240326171229-4-525671/ri-china-kerja-sama-garap-proyek-baterai-ev-ini-kabar-terbaru>.
- Muliawati, Firda D., and CNBC Indonesia. 2023. "Banyak Pabrik Nikel RI Dibangun Investor China, Ini Alasannya." CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230818143716-4-464117/banyak-pabrik-nikel-ri-dibangun-investor-china-ini-alasannya>.
- Nurbaiti, M. S. Boedoyo, and Purnomo Yusgiantoro. 2022. "Pengelolaan Nikel Indonesia Terhadap Pertahanan Negara dan Ketahanan Energi." *Jurnal Ketahanan Energi* 8, no. 2 (Desember). <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KE/article/view/4465>.
- NurW. 2023. "Harga Maung Akan Lebih Murah dan Content Lokalnya Naik Jadi 92 Persen." DEFENSE STUDIES. <http://defense-studies.blogspot.com/2023/11/harga-maung-akan-lebih-murah-dan.html>.
- Oatley, Thomas H. 2023. *International Political Economy*. N.p.: Routledge.
- Prakoso, Rangga. 2013. "Bintang Smelter Mulai Bangun Pabrik Pengolahan Bijih Nikel." BeritaSatu.com. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/151116/bintang-smelter-mulai-bangun-pabrik-pengolahan-bijih-nikel>.
- Pranata, Nika. 2015. "Kutukan Negara Kaya Sumber Daya Alam." Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. <http://lipi.go.id/lipimedia/kutukan-negara-kaya-sumber-daya-alam/10382>.
- Prasetyani, Yussy M., and Sheila Respati. 2024. "Hilirisasi Nikel, Bagaimana Dampaknya bagi Pertumbuhan Ekonomi? Halaman all - Kompas.com." Kompas.com.

- <https://money.kompas.com/read/2024/04/18/132319226/hilirisasi-nikel-bagaimana-dampaknya-bagi-pertumbuhan-ekonomi?page=all>.
- Presiden Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Presiden Republik Indonesia, Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan*. N.p.: Database Peraturan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/116973/perpres-no-55-tahun-2019>.
- Project Multatuli. 2024. "Cina di Hilir: Gurita Oligarki Nikel Indonesia." Project Multatuli. <https://projectmultatuli.org/cina-di-hilir-gurita-oligarki-nikel-indonesia/>.
- PT Aneka Tambang Tbk. 2018. "Laporan Tahun 2018," Kegiatan dan Bidang Usaha. In *Kegiatan Usaha*, 145 - 155. [www.antam.com](http://www.antam.com).
- PT Ifishdeco Tbk. 2023. "Sejarah Perusahaan." PT IFISHDECO Tbk. <https://www.ifishdeco.com/id/sejarah-perusahaan/>.
- PT PINDAD. 2021. "Pindad Pamerkan Maung, MV2 dan Perkenalkan Prototipe MotoEV di Mandalika." PT. Pindad (Persero). <https://pindad.com/pindad-pamerkan-maung-mv2-dan-perkenalkan-prototipe-motoev-di-mandalika>.
- Puramdhona, Ananda B., and Dwi Arjanto. 2023. "Perusahaan Smelter Nikel dari Cina: Ini Profil PT TISS Morowali dan PT GNI." *Bisnis Tempo*. <https://bisnis.tempo.co/read/1814128/perusahaan-smelter-nikel-dari-cina-ini-profil-pt-tiss-morowali-dan-pt-gni>.
- Puspen TNI. 2017. "TNI AL Lanal Kendari Amankan Tiga Kapal Muatan Nikel Tanpa Dokumen Lengkap." [tni.mil.id](http://tni.mil.id). <https://tni.mil.id/view-212805-tni-al-lanal-kendari-amankan-tiga-kapal-muatan-nikel-tanpa-dokumen-lengkap.html>.
- Rahayu, Arfyana C., and Herlina K. Dewi. 2023. "Dari 34 Smelter Nikel yang Beroperasi, Baru 4 Smelter Masuk Hilirisasi." *industri kontan*. <https://industri.kontan.co.id/news/dari-34-smelter-nikel-yang-beroperasi-baru-4-smelter-masuk-hilirisasi>.
- Rahayu, Aryana C., and Anna S. Perwitasari. 2023. "Kementerian ESDM: 90% Smelter Nikel di Indonesia Gunakan Teknologi dari China." *industri kontan*. <https://industri.kontan.co.id/news/kementerian-esdm-90-smelter-nikel-di-indonesia-gunakan-teknologi-dari-china>.
- Santia, Tira. 2023. "Dubes Uni Eropa Angkat Bicara soal Hilirisasi hingga Larangan Ekspor Nikel." *Liputan6.com*, January 24, 2023. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5188605/dubes-uni-eropa-angkat-bicara-soal-hilirisasi-hingga-larangan-ekspor-nikel>.
- Santoso, Rizal B., Dwi F. Moenardy, Rizqi Muttaqin, Denny Saputera, and Universitas Widyatama. 2023. "Pilihan Rasional Indonesia dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel." *Indonesian Perspective* 8, no. 1 (Juni). <https://www.semanticscholar.org/reader/5c540d236dc7b938e38ed5dab68190f67f61e6c7>.
- Setiawa, Verda N. 2022. "Gandeng China Bangun Smelter, Vale Jadi Pemegang Minoritas." *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220510161053-17-337890/gandeng-china-bangun-smelter-vale-jadi-pemegang-minoritas>.

- Setiawan, Verda N., and CNBC Indonesia. 2023. "Jokowi Janjikan Tambang Nikel ke Elon Musk, Ini Kata ESDM." *CNBC Indonesia*, February 2, 2023.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230202174557-4-410542/jokowi-janjikan-tambang-nikel-ke-elon-musk-ini-kata-esdm>.
- Shiddiq. 2023. "Saat ini Sudah Ada 37 Smelter Beroperasi di Indonesia." *Media Nikel Indonesia*.  
<https://nikel.co.id/2023/10/16/saat-ini-sudah-ada-37-smelter-beroperasi-di-indonesia/>.
- Simon, Herbert A. 1955. "A Behavioral Model of Rational Choice." *The Quarterly Journal of Economics* 69, no. 1 (Februari).  
<https://doi.org/10.2307/1884852>.
- Siombo, Marhaeni R. 2023. "Kajian Hukum Hilirisasi dan Penghentian Ekspor Mineral Logam." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, no. 2 (Maret).  
 10.58258/jisip.v7i2.4915/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index.
- Strange, Susan. 1988. *States and Markets*. N.p.: Pinter.
- Strange, Susan. 2015. *States and Markets*. N.p.: Bloomsbury Publishing.
- Syafira, Anisa D., Chikal M. Putri, Ekawati Widyaningsih, and Putri Kusumawijaya. 2023. "Analisis Peluang, Tantangan, dan Dampak Larangan Ekspor Nikel Terhadap Perdagangan Internasional di Tengah Gugatan Uni Eropa di WTO." *Jurnal Economina* 2, no. 1 (Januari).  
<https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.258>.
- TBK Harita Nickel. 2023. "Resmi! RI Miliki Pabrik Nikel Sulfat Pertama di Indonesia dan Terbesar di Dunia." Trimegah Bangun Persada.  
<https://tbpnickel.com/id/media/press-release/operational/resmi-ri-miliki-pabrik-nikel-sulfat-pertama-di-indonesia-dan-terbesar-di-dunia>.
- TBP Harita Nickel. 2024. "Ekonomi Global Tak Menentu, Harita Nickel Tetap Bertumbuh dan Berkinerja Kuat di 2023." Trimegah Bangun Persada.  
<https://tbpnickel.com/id/media/press-release/operational/amidst-uncertain-global-economy-harita-nickel-continues-to-grow-and-perform-strongly-in-2023>.
- Tsirwiyati, Dwi N. 2023. "Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, (Mei).  
<https://doi.org/10.31849/respublica.v22i2.13468>.
- Umah, Anisatul. 2021. "Ini 5 Produsen Nikel Terbesar RI, Siapa Jawaranya?" *CNBC Indonesia*.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210707161618-4-259046/ini-5-producen-nikel-terbesar-ri-siapa-jawaranya>.
- Vale. 2020. *Reinforcing and Inspiring*, Laporan Keberlanjutan Sustainability Report.  
<https://vale.com/documents/44618/3555118/2020-Sustainability-Report-P-T-Vale-Indonesia-Tbk.pdf>.
- Vale. 2023. "PT Vale Perkuat Kerja Sama PLN, Dukung Ketersediaan Daya Listrik pada Fase Konstruksi Blok Pomalaa." Vale.  
<https://vale.com/in/w/pt-vale-perkuat-kerja-sama-pln-dukung-ketersediaan-daya-listrik-pada-fase-konstruksi-blok-pomalaa>.

- wahyudi, Nyoman A. 2022. "Jokowi Ingin Timah Tiru Kesuksesan Nikel, Ini Rencana Hilirisasi PT Timah Tbk (TINS)." *Ekonomi*.  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221020/44/1589751/jokowi-ingin-timah-tiru-kesuksesan-nikel-ini-rencana-hilirisasi-pt-timah-tbk-tins>.
- Winona, Christina V. 2022. "Industri Nikel Indonesia Pasca Sengketa Perdagangan dengan Uni Eropa." CWTS Pusat Studi Perdagangan Dunia.  
<https://cwts.ugm.ac.id/2022/11/03/industri-nikel-indonesia-pasca-sengketa-perdagangan-dengan-uni-eropa/>.
- WTO ANALYTICAL INDEX. 1994. "ARTICLE XI OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994."  
[https://www.wto.org/english/res\\_e/publications\\_e/ai17\\_e/gatt1994\\_art11\\_oth.pdf](https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gatt1994_art11_oth.pdf).
- Zainuddin, Hasbi. 2023. "Ini 6 Proyek Smelter Nikel Perusahaan China Huayou di RI, yang Terkemuka dalam Teknologi HPAL." *Terkini.id*.  
<https://terkini.id/read/td-3494/ini-6-proyek-smelter-nikel-perusahaan-china-huayou-di-ri-yang-terkemuka-dalam-teknologi-hpal?page=2>.